

No. Katalog : 9302001.7312

P D R B

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng 2013



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN SOPPENG
2013**

<https://soppengkab.bps.go.id>
<http://soppengkab.bps.go.id/>

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN SOPPENG 2013

Nomor Publikasi : 73125.1419
Katalog BPS : 9302001.7312
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : 58+ vii

Naskah/Editor:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

"Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya"



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SOPPENG**

Kata Pengantar

Dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan suatu wilayah, peranan data statistik dirasakan semakin penting, sejalan dengan perkembangan pembangunan yang semakin pesat. Salah satu diantaranya adalah data statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng telah menghitung dan menyusun PDRB tahun 2013 dengan menggunakan tahun dasar 2000. Didalam publikasi ini disajikan beberapa hal antara lain mengenai besaran nilai PDRB menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita penduduk Kabupaten Soppeng selama kurun waktu tahun 2011-2013.

Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Watansoppeng, September 2014

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SOPPENG
Kepala**

H. MUH. ASRI LANTONG, SE
NIP. 19661121 199301 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Katalog Publikasi	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik.....	vi
Daftar Lampiran Tabel	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Umum	1
1.2 Konsep dan Definisi.....	3
1.3 Metode Penghitungan	5
1.4 Uraian Sektoral	7
BAB 2. TINJAUAN PDRB KABUPATEN SOPPENG	
2.1 Perkembangan Ekonomi	23
2.2 Pertumbuhan Ekonomi	26
2.3 Struktur Ekonomi	28
2.4 PDRB Perkapita	30
BAB 3. PERTUMBUHAN RIIL SEKTORAL	
3.1 Sektor Pertanian.....	34
3.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian.....	36
3.3 Sektor Industri Pengolahan.....	36
3.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.....	37
3.5 Sektor Bangunan	37
3.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	37
3.7 Sektor Angkutan dan Komunikasi.....	38
3.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.....	38
3.9 Sektor Jasa-Jasa.....	38
Lampiran Tabel Pokok PDRB.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan PDRB Sulawesi Selatan dan PDRB Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013	24
Tabel 2.2	Perbandingan PDRB Kabupaten Soppeng dengan Beberapa Kabupaten Terdekat Tahun 2013	25
Tabel 2.3	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2013	27
Tabel 2.4	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Sulawesi Selatan dan Beberapa Kabupaten Terdekat Tahun 2012-2013 (persen)	27
Tabel 2.5	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2013 (dalam persen)	30
Tabel 2.6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2013	31
Tabel 2.7	PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Beberapa Kabupaten di Sekitar Soppeng Tahun 2013	32
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Tiap Sektor di Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2013 (dalam persen)	34
Tabel 3.2	Pertumbuhan Riil tiap Subsektor pada Sektor Pertanian Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2013 (dalam persen)	34
Tabel 3.3	Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2013 (dalam Ton)	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	PDRB Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2013 (milyar Rupiah)	24
Grafik 2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2013 (dalam persen)	26
Grafik 3	Pola Struktur Ekonomi Kabupaten Soppeng Periode 2003-2013	29
Grafik 4	Distribusi Persentase PDRB menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Soppeng Tahun 2012	29
Grafik 4	Distribusi Persentase PDRB menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Soppeng Tahun 2013	29
Grafik 6	Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor Kabupaten Soppeng Tahun 2013 (dalam persen)	33

<https://soppengkab.bps.go.id/>
<http://soppengkab.bps.go.id/>

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (Juta Rp)	39
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011-2013 (Juta Rp)	41
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (Persen)	43
Tabel 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2013 (Persen)	45
Tabel 5	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (Persen)	47
Tabel 6	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2013 (Persen)	49
Tabel 7	Produk Domestik Regional Bruto dan Angka Perkapita Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013	51
Tabel 8	Produk Domestik Regional Bruto dan Angka Perkapita Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2013	52
Tabel 9	Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (Persen)	53
Tabel 10	Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2013 (Persen)	55
Tabel 11	Indeks implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2013 (Persen)	57

1.1 UMUM

Istilah pembangunan dapat dimaknai dalam berbagai persepsi yang berbeda antara orang satu dengan orang yang lain, antara daerah satu dengan daerah yang lain dan antara negara satu dengan negara yang lain. Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Products*) suatu negara dan difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (*Gross Domestic Regional Products*) pada suatu provinsi, kabupaten atau kota.

Seiring perkembangan waktu, muncul alternatif definisi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan perkapita (*income perkapita*). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara atau daerah untuk meningkatkan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Blakely, 1989).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain, arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat secara mantap dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Terkait dengan pentingnya pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi yang matang dan tepat menjadi suatu hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota, telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, menentukan strategi dan membuat kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok dalam perencanaan ekonomi suatu daerah yaitu: (i) bagaimana mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara mantap dan (ii) bagaimana agar pendapatan yang timbul tersebut dapat dibagi atau diterima masyarakat secara merata.

Oleh karena itu, dalam membuat perencanaan pembangunan ekonomi dibutuhkan berbagai macam data statistik yang lengkap (*complete*), tepat (*accurate*), mutakhir (*up to date*) dan terpercaya (*reliable*) sebagai bahan analisa guna menentukan dan mengarahkan sasaran pembangunan serta sebagai dasar dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang akan diambil.

Berbagai data statistik mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran keadaan masa lalu, masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Dari data statistik ini pula, daerah bisa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap strategi atau kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang diambil pada masa lalu dan hasil yang telah dicapai sebagai akibat pelaksanaan strategi dan kebijaksanaan tersebut oleh berbagai pihak baik pemerintah daerah sendiri maupun pihak swasta.

Salah satu data statistik yang dibutuhkan adalah data yang dapat memberikan informasi dan gambaran perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, guna mengetahui pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai serta potensi-potensi komoditi ekonomi yang potensial dan perlu dikembangkan. Data tersebut adalah “Produk Domestik Regional Bruto”. Dari data ini pula dapat diketahui nilai-nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah/daerah dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Untuk memenuhi maksud tersebut, telah disusun perhitungan PDRB Kabupaten Soppeng tahun 2013 dengan tahun dasar 2000. Adapun kegunaan dari informasi data PDRB antara lain sebagai berikut :

- a. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- b. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau pertumbuhan setiap sektor dari tahun ke tahun dalam suatu daerah.
- c. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
- d. Sebagai salah satu indikator mengenai tingkat kemakmuran.
- e. Mengetahui tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi).
- f. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- g. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.
- h. Sebagai salah satu indikator komponen penyusunan DAU.

1.2 KONSEP DAN DEFINISI

Berikut ini dijelaskan beberapa konsep dan definisi yang dipakai dalam penghitungan PDRB Kabupaten Soppeng.

1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai tambah bruto adalah tambahan nilai yang ditimbulkan oleh aktivitas faktor-faktor produksi dalam merubah/memproses bahan baku dan penolong sehingga lebih dekat kepada pengguna atau nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor produksi. Apabila seluruh nilai tambah bruto atau nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi dalam wilayah tertentu dan dalam jangka tertentu dijumlahkan maka diperoleh **Produk Domestik Regional Bruto**.

PDRB disajikan menurut tiga cara penghitungan:

a. Menurut Produksi

PDRB adalah jumlah nilai netto produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai unit produksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu: 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Pengalihan, 3. Industri Pengolahan, 4. Listrik, Gas dan Air Bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7. Pengangkutan dan Komunikasi, 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

b. Menurut Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di wilayah tertentu pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswastaan/entrepreneurship); semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pengeluaran

PDRB adalah jumlah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap

perubahan stok, dan ekspor netto disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Secara konsep tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena didalamnya sudah dicakup pajak tak langsung netto.

1.2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

1.2.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang “tetap” pada tahun dasar. Dalam publikasi ini harga pasar yang tetap itu adalah harga-harga pada keadaan tahun 2000. Biasanya disebut PDRB harga konstan dengan tahun dasar 2000.

1.2.4 PDRN (Produk Domestik Regional Neto) Atas Dasar Harga Pasar

PDRN atas dasar harga pasar adalah PDRB dikurangi dengan nilai penyusutan barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

1.2.5 PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi

PDRN atas dasar biaya faktor produksi adalah nilai PDRN atas dasar harga pasar dikurangi dengan nilai pajak tidak langsung netto pada tahun yang bersangkutan.

1.2.6 Pendapatan Perkapita (*Regional Income*)

Pendapatan perkapita adalah nilai PDRN atas dasar biaya faktor ditambah dengan pendapatan netto (pendapatan yang masuk dikurangi dengan pendapatan yang keluar). Karena arus pendapatan diatas sulit dihitung, maka pendapatan regional dianggap sama PDRN atas biaya faktor.

1.2.7 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah PDRN atas dasar biaya faktor produksi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun untuk tahun yang sama.

1.2.8 Penyusutan Barang Modal Tetap

Penyusutan barang modal tetap adalah susutnya nilai suatu barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi.

1.2.9 Pajak Tidak Langsung Neto

Pajak tidak langsung neto adalah pajak tak langsung dikurangi subsidi yang diberikan kepada produsen pada tahun yang sama.

1.3 METODE PENGHITUNGAN

Beberapa metode yang dipakai dalam menghitung PDRB Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

1.3.1 Metode Langsung

Metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Metode langsung akan dapat memperlihatkan karakteristik sosial ekonomi setiap daerah. Disamping itu manfaat pemakaian data daerah dapat digunakan untuk menyempurnakan data statistik daerah yang lemah. Hasil penghitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah ini. Metode langsung dapat dilakukan dengan menggunakan 3 macam pendekatan yaitu :

- a. **Pendekatan Produksi**, yaitu menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau sub sektor. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi. Formulanya adalah sebagai berikut :

$$NTB = NPhp - BA$$

dimana,

NTB = Nilai tambah bruto

NPhp = Nilai produksi pada harga produsen

BA = Biaya antara

Apabila NPhp sulit diketahui karena sulit memperoleh data harga produsen, maka NPhp dihitung sebagai berikut :

$$\text{NPhk} = \text{NPhk} - \text{TTM}$$

dimana,

NPhk = Nilai produksi pada harga pembeli

TTM = Margin perdagangan dan angkutan
(Trade and Transport Margin)

- b. **Pendekatan Pendapatan**, yaitu cara menghitung nilai tambah bruto dengan menjumlahkan seluruh unsur-unsur balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Yang termasuk dalam surplus usaha disini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan.

Formula penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{NTB} = \text{NTN} + \text{D}$$

dimana,

NTB = Nilai tambah bruto

NTN = Nilai tambah netto

D = Penyusutan (depresiasi barang modal tetap)

Sedangkan nilai tambah netto dihitung dengan formula

$$\text{NTN} = \text{UpG} + \text{SU} + \text{PTL}$$

dimana,

UpG = Upah dan gaji (biaya tenaga kerja)

SU = Surplus usaha, yang terdiri atas sewa tanah, bunga Netto, dan profit.

PTL = Pajak tak langsung neto (setelah subsidi pemerintah dikeluarkan).

- c. **Pendekatan Pengeluaran**, yaitu menghitung jumlah pengeluaran konsumsi akhir atas barang dan jasa yang diproduksi maupun diimpor dari luar wilayah (Kabupaten Soppeng) dan perubahan stok. Jadi produk domestik regional dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk produk domestik regional tersebut. Secara umum pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut :
- melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang, metode penjualan eceran dan metode penilaian eceran.
 - melalui pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga metode data anggaran belanja, metode *balance sheet* dan metode statistik perdagangan luar negeri.

1.3.2 Metode Tidak Langsung

Didalam cara ini, penghitungan PDRB untuk sektor tertentu dilakukan dengan mengalokasikan PDB atau nilai tambah dari setiap sektor/subsektor komoditas/kegiatan usaha dari lingkup nasional/multi regional dengan menggunakan indikator yang relevan.

1.3.3 Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

Untuk menghitung PDRB atas dasar harga konstan 2000 digunakan cara yaitu:

- a) **Cara Revaluasi**, yaitu menilai kembali PDRB sesuai harga pada tahun dasar (dalam hal ini tahun 2000). Baik produksi, biaya antara, penyusutan maupun pajak tidak langsung dinilai dengan harga pada tahun dasar tersebut.
- b) **Cara Ekstrapolasi**, yaitu menghitung nilai tambah masing-masing tahun dengan cara mengalikan nilai pada tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing kegiatan/ komoditas yang relevan.
- c) **Cara Deflasi**, yaitu menghitung nilai tambah masing-masing tahun dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku dengan indeks harga untuk masing-masing kegiatan yang relevan.
- d) **Cara Deflasi Berganda**, dalam hal ini yang dideflasikan adalah nilai produksi (output) dan biaya antaranya. Kemudian nilai tambah atas dasar harga konstan dihitung dengan cara mengurangi nilai produksi dengan biaya antara.

1.4 URAIAN SEKTORAL

Uraian sektoral meliputi ruang lingkup, definisi dari masing-masing sektor atau sub sektor, serta cara penghitungan nilai tambah baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, serta sumber datanya. Uraian sektoral ini mengadopsi konsep dan definisi yang digunakan dalam “*System of National Account (SNA)*” tahun 1993, hal lain mengenai cakupan dan cara-cara penghitungan yang dilakukan disesuaikan dengan kelengkapan dan kualitas data yang tersedia.

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda atau barang biologis (hidup). Yang termasuk dalam sektor pertanian adalah :

1.1. Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor tanaman bahan makanan meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditi bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, ubi-ubian, kacang tanah, kacang kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian, serta bahan makanan lainnya.

Data produksi diperoleh dari BPS dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng, sedangkan data harga seluruhnya bersumber pada data harga yang dikumpulkan oleh BPS (Statistik Harga Produsen dan Statistik Harga Konsumen).

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi yaitu mengalikan terlebih dahulu setiap jenis kuantum produksi dengan masing-masing harga produsennya, kemudian hasilnya dikurangi biaya antara atas dasar harga berlaku pada setiap tahun. Biaya antara tersebut diperoleh dengan menggunakan rasio biaya antara terhadap output dari berbagai hasil survei seperti Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR), Survei Khusus Input-Output (SKIO), dan Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT).

Nilai Tambah Bruto atas dasar harga konstan, dihitung dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan produksi pada masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar, kemudian dikurangi dengan rasio biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

1.2. Tanaman Perkebunan

Sub sektor tanaman perkebunan meliputi semua jenis kegiatan ekonomi tanaman perkebunan yang diusahakan baik oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Komoditi yang dihasilkan seperti cengkeh, jahe, jambu mete, kakao, kapas, kelapa, kelapa sawit, kemiri, kopi, lada, tembakau, serta tanaman lainnya.

Data produksi diperoleh dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Soppeng, sedangkan data harga diperoleh dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Soppeng dan BPS (Statistik Harga Perdagangan Besar dan Statistik Harga Konsumen).

Nilai tambah Bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara pendekatan produksi. Rasio biaya antara diperoleh dari Survei Khusus Input Output. Nilai tambah Bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan cara revaluasi.

1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya

Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya semua jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Komoditi hasil peternakan antara lain: sapi, kerbau, kambing, babi, kuda, ayam, itik, telur ayam, telur itik, susu sapi, kulit, serta hewan peliharaan lainnya.

Produksi sub sektor peternakan dihitung dengan tiga variabel yaitu pemotongan, kenaikan stok, dan ekspor netto dengan rumus banyaknya ternak/unggas yang dipotong ditambah selisih antara populasi akhir dan populasi awal ditambah lagi dengan selisih ekspor dan impor. Produksi ikutannya adalah telur, susu, pupuk kandang, kulit dan bulu. Pada dasarnya daging tidak termasuk dalam hasil-hasil peternakan, karena kegiatan pemotongan ternak termasuk dalam sektor industri. Tetapi dalam hal pemotongan yang dilakukan oleh petani untuk dikonsumsi sendiri dan kegiatan ini sulit dipisahkan maka kegiatan ini dimasukkan sebagai hasil peternakan.

Data mengenai jumlah ternak yang dipotong, populasi ternak dan produksi telur diperoleh dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Soppeng, sedangkan data harga diperoleh dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Soppeng dan BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dihitung dengan pendekatan produksi yaitu dengan cara mengurangi nilai produksi (output) dengan biaya antara yang rasionya diperoleh dari Survei Khusus Sektoral (SKS).

1.4. Kehutanan

Sub sektor kehutanan meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran, termasuk juga kegiatan perburuan. Komoditi hasil kehutanan diantaranya adalah kayu gelondong (baik yang berasal dari hutan rimba, maupun dari hutan budidaya), kayu bakar, rotan, arang, bambu dan hasil hutan lainnya.

Kegiatan perburuan meliputi penangkapan binatang liar seperti buaya, babi hutan, biawak, menjangan dan harimau baik untuk dikonsumsi dagingnya maupun diambil kulit, bulu dan tulangnya. Termasuk juga hasil buruan lainnya seperti pengambilan sarang burung, telur dan tanduk. Akan tetapi perburuan yang lebih menekankan unsur hobi tidak dimasukkan sebagai kegiatan perburuan.

Data produksi diperoleh dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Soppeng, sedangkan data harga diperoleh dari BPS dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Soppeng.

1.5. Perikanan

Sub sektor perikanan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya baik yang berada di air tawar maupun yang berada di air asin. Komoditi hasil perikanan antara lain seperti ikan laut, ikan emas dan jenis ikan darat lainnya, ikan bandeng dan jenis ikan payau lainnya, cumi-cumi dan jenis binatang lunak lainnya, rumput laut dan jenis tumbuhan laut lainnya.

Data produksi dan nilai produksi diperoleh dari Peternakan dan Perikanan Kabupaten Soppeng, sedangkan data harga diperoleh dari Peternakan dan Perikanan Kabupaten Soppeng dan BPS. Perhitungan nilai tambah bruto menggunakan pendekatan produksi dengan rasio biaya antara yang diperoleh dari Survei Khusus Pendapatan

Regional. Perhitungan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan menggunakan cara revaluasi.

Kegiatan jasa pertanian merupakan jasa-jasa khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan ekonomi pertanian berdasarkan suatu pungutan atau kontrak tertentu. Termasuk juga disini penyewaan alat pertanian dengan operatornya dengan syarat pengelolaan dan resiko usaha tersebut dilakukan secara terpisah.

Dalam penghitungan nilai tambah sektor pertanian, secara konsep nilai tambah jasa pertanian ini terdistribusi pada masing-masing sub sektor (misalnya jasa Dokter Hewan pada sub sektor peternakan, jasa memetik kopi pada sub sektor perkebunan dan sebagainya). Akan tetapi karena belum tersedia data/informasi yang lengkap tentang jasa pertanian, maka nilai tersebut dianggap terwakili dalam besarnya persentase *mark-up* untuk tiap-tiap sub sektor.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kegiatan pertambangan dan penggalian adalah kegiatan yang mencakup penggalian, pengeboran, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, benda cair maupun gas. Penambangan dan penggalian ini dapat dilakukan dibawah tanah maupun diatas permukaan bumi. Sifat dan tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk menciptakan nilai tambah dari barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual atau diproses lebih lanjut. Kegiatan lain yang termasuk dalam sektor ini adalah pembuatan garam dengan cara menguapkan air laut.

2.1 Pertambangan Migas

Pertambangan Migas (minyak dan gas bumi) meliputi kegiatan pencarian kandungan minyak dan gas bumi, penyiapan pengeboran, penambangan, penguapan, pemisahan serta penampungan untuk dapat dijual atau dipasarkan.

2.2 Pertambangan Tanpa Migas

Pertambangan tanpa migas meliputi pengambilan dan persiapan pengolahan lanjutan benda padat baik dibawah maupun diatas permukaan bumi serta seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memanfaatkan biji logam dan hasil tambang lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah batu bara, pasir besi, biji timah, bijih nikel, *ferro nikel*, *nikel mattes*, biji bauksit, biji tembaga dan komoditi lainnya. Oleh karena di Kabupaten Soppeng tidak ada kegiatan penambangan bukan migas, maka nilai tambah dari subsektor ini tidak dihitung.

2.3 Penggalian

Kegiatan ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi yang biasa disebut dengan bahan galian C. Hasil kegiatan ini antara lain adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat dan sebagainya termasuk garam kasar dan komoditi penggalian lainnya.

Metode perhitungan yang dipergunakan untuk memperkirakan besarnya output sub sektor penggalian yaitu dengan cara tidak langsung. Output sektor penggalian diperkirakan dari permintaan sektor lain yang menggunakan hasil kegiatan penggalian. Misalnya sektor industri batu bata menggunakan tanah liat sebagai bahan bakunya, sektor industri batako menggunakan pasir dan sektor bangunan membutuhkan pasir, batu koral, tanah urug dan sebagainya untuk bahan bakunya.

Karena data yang dipakai adalah data yang berasal dari sudut permintaan, maka nilai output yang diperoleh berupa nilai dalam harga pembeli oleh sektor pemakai barang galian tersebut. Output sektor penggalian harus dinilai dalam harga produsen, sehingga untuk memperoleh nilai dalam harga produsen, nilai atas dasar pembeli tersebut harus dikurangi dengan biaya angkutan dan margin perdagangan. Sedangkan untuk perhitungan atas dasar harga konstan menggunakan cara deflasi dengan menggunakan indeks harga yang sesuai (indeks harga konsumen).

Dalam penghitungan sektor ini, indikator produksi diperoleh dari Dinas Pertambangan, Energi dan PSDA Kabupaten Soppeng.

3. Sektor Industri Pengolahan

Kegiatan industri adalah kegiatan untuk mengubah bentuk baik secara teknis maupun secara kimiawi dari bahan organik atau anorganik menjadi produk baru yang lebih tinggi nilainya. Proses tersebut dapat dilakukan dengan mesin atau tangan, baik dibuat didalam sebuah pabrik atau rumah tangga. Termasuk juga disini perakitan bagian suku cadang barang-barang industri di pabrik seperti peralatan mobil dan alat-alat elektronik.

Industri pengolahan secara garis besarnya dibagi atas dua kelompok yaitu industri dengan migas dan industri tanpa migas. Untuk pengumpulan data statistik industri pengolahan, Badan Pusat Statistik mengelompokkan kegiatan industri menurut banyaknya tenaga kerja yang ikut terlibat dalam kegiatan industri pengolahan yaitu :

- a. Industri Besar, adalah perusahaan industri yang menggunakan tenaga kerja lebih atau sama dengan 100.
- b. Industri Sedang, adalah perusahaan industri yang menggunakan tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

- c. Industri Kecil, adalah perusahaan industri yang menggunakan tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.
- d. Industri Kerajinan Rumah Tangga, adalah perusahaan industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 5 orang.

3.1 Industri Besar Sedang

Baik output maupun nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari Statistik Industri Besar dan Sedang BPS. Output atas dasar harga konstan, dihitung dengan cara mengekstrapolasi output pada tahun dasar dengan indeks produksi yang diperoleh dari Statistik Industri Besar dan Sedang. Untuk mendapat nilai tambah bruto, output yang dihasilkan baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dikurangi dengan biaya antara (rasionya diperoleh dari Survei Khusus Pendapatan Regional).

3.2. Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga

Output dan nilai tambah bruto tahun 2000 untuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga diperoleh dari hasil Survei Usaha Terintegrasi (SUSI) tahun 2000, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya diestimasi berdasarkan pola perkembangan industri kecil dan kerajinan rumah tangga laporan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Output industri kecil dan kerajinan rumah tangga atas dasar harga konstan diperkirakan dengan mengalikan output tahun 2000 dengan indeks produksi dari industri kecil dan kerajinan rumah tangga, yang selanjutnya dengan menggunakan indeks harga perdagangan besar diperoleh output atas dasar harga berlaku.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan pada rasio nilai tambah masing-masing tahun, sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan didasarkan pada rasio nilai tambah pada tahun dasar.

4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

4.1. Listrik

Kegiatan ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan Non PLN seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan Pemerintah Daerah dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan), dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau yang diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan listrik yang dicuri.

Data produksi, harga dan biaya antara baik yang mencakup PLN maupun Non PLN diperoleh dari PT.PLN Persero Cabang Watansoppeng. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari pengalihan produksi dengan rata-rata harga tertimbang dari listrik yang terjual. Sedangkan Output atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara revaluasi.

4.2. Air Bersih

Kegiatan subsektor air bersih mencakup proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air bersih, serta pendistribusian dan penyalurannya secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumahtangga, instansi pemerintah maupun swasta. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun bukan PDAM.

Data produksi, harga dan output lainnya diperoleh dari Statistik Air Minum yang diterbitkan tiap tahun oleh BPS serta data dari PDAM Kabupaten Soppeng. Begitu juga data rasio nilai tambah bruto terhadap output juga diperoleh dari Statistik Air Minum BPS.

Output atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara revaluasi. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan mengalikan rasio nilai tambah tahun dasar dengan outputnya, sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku menggunakan rasio nilai tambah pada masing-masing tahun.

5. Sektor Bangunan

Sektor bangunan mencakup semua kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana lainnya.

Kegiatan di sektor bangunan dapat dilakukan oleh Kontraktor Umum atau Kontraktor Khusus, termasuk kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh perorangan. Kontraktor Umum adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi baik untuk pihak lain atau untuk keperluan sendiri. Sedangkan Kontraktor Khusus adalah perusahaan/unit usaha yang biasanya hanya mengerjakan sebagian dari suatu pekerjaan proyek atas dasar suatu kontrak dari pihak lain.

Output dari kegiatan konstruksi pada suatu tahun adalah nilai semua pekerjaan yang telah dilaksanakan selama tahun tersebut tanpa memperhatikan apakah bangunan yang dikerjakan tersebut sudah selesai atau belum. Suatu kegiatan konstruksi kadang-kadang memakan waktu yang cukup lama (lebih dari satu tahun), untuk itu harus dapat ditentukan output satu tahun tertentu yang dikehendaki.

Data mengenai besarnya nilai bangunan (nilai produksi) pada tahun 2000, diperoleh dari besaran nilai konstruksi dalam realisasi APBD pada tahun yang bersangkutan dan ditambah dengan besaran *Mark Up* untuk menampung kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh swasta/perorangan. Sedangkan perhitungan output atas dasar harga berlaku untuk tahun-tahun berikutnya digunakan hasil survei konstruksi yang dilakukan setiap tahun untuk memantau perkembangan kegiatan produksi.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai tambah bruto sektor bangunan adalah melalui pendekatan arus barang (*Commodity Flows*). Penggunaan metode ini didasarkan kepada pemikiran bahwa besarnya output pada sektor bangunan sejalan dengan

besarnya input yang dipergunakan untuk satu bangunan. Metode estimasi untuk memperoleh output dan nilai tambah bruto sektor bangunan, menggunakan cara ekstrapolasi yaitu output dan nilai tambah bruto dengan harga konstan harus diperoleh dahulu kemudian baru memperoleh output dan nilai tambah atas dasar harga berlaku.

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

6.1. Perdagangan Besar dan Eceran

Kegiatan yang dicakup dalam sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas untuk tujuan penyaluran/ pendistribusian tanpa merubah sifat barang tersebut. Kegiatan yang dicakup dalam sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang tersebut.

Metode estimasi yang digunakan untuk perhitungan nilai tambah sektor perdagangan menggunakan metode arus barang (*Commodity Flows*). Output atau margin perdagangan merupakan selisih antara nilai jual dan nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi dengan biaya angkutan barang dagangan yang dikeluarkan oleh pedagang. Dengan metode arus barang, output dihitung berdasarkan besarnya margin perdagangan yang timbul akibat memperdagangkan barang-barang dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta barang-barang dari impor.

Nilai tambah bruto diperoleh berdasarkan perkalian antara total output perdagangan dengan rasio nilai tambah bruto. Untuk memperoleh total nilai tambah bruto sub sektor perdagangan seharusnya ditambah dengan pajak penjualan dan bea masuk barang-barang impor. Namun untuk Kabupaten Soppeng tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data.

6.2. Restoran

Kegiatan sub sektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam sub sektor restoran seperti rumah makan, warung nasi, warung sate, warung kopi, catering dan kantin.

Data mengenai konsumsi makanan dan minuman jadi diluar rumah diperoleh dari Susenas dan deflatornya adalah IHK kelompok makanan dari BPS. Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung nilai tambah sub sektor restoran adalah menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi makanan dan minuman jadi di luar rumah. Output atas dasar harga berlaku diperkirakan berdasarkan indikator konsumsi makanan dan minuman jadi diluar rumah.

Output atas dasar harga konstan, diperoleh dengan metode deflasi dimana IHK (Indeks Harga Konsumen) kelompok makanan sebagai deflatornya. Sedangkan nilai tambah bruto diperoleh berdasarkan perkalian antara output dengan rasio nilai tambah bruto terhadap output.

6.3. Hotel

Sub sektor hotel mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi disini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sebagainya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap dimana kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan yang datanya sulit dipisahkan.

Indikator produksi yang digunakan adalah Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dikali jumlah kamar tiap-tiap hotel. Indikator harganya adalah rata-rata tarif kamar. Sumber datanya adalah Statistik Perhotelan dari BPS.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan nilai tambah bruto diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio nilai tambah brutonya. Output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan revaluasi.

7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang melalui darat, laut, sungai dan danau, dan udara. Termasuk juga penunjang angkutan dan komunikasi.

7.1 Angkutan Jalan Raya

Kegiatannya meliputi kegiatan angkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk disini kegiatan lainnya seperti *carter*/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi. Tidak termasuk kegiatan lainnya yang diusahakan sebagai satu satuan usaha dengan kegiatan angkutan jalan raya seperti jasa bongkar muat, keagenan barang dan penumpang, perbaikan dan pemeliharaan.

Data indikator produksi bersumber dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng. Sedangkan data harga diperoleh dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng dan BPS (Survei Khusus Input Output dan Survei Khusus Pendapatan Regional).

Output Atas dasar harga berlaku merupakan perkalian indikator produksi dengan indikator harga untuk masing-masing jenis angkutan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara revaluasi dan ekstrapolasi. Nilai tambah bruto dihitung berdasarkan rasio nilai tambah bruto dengan outputnya.

7.2 Angkutan Laut

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan untuk perusahaan lain yang berada dalam satu satuan usaha, dimana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang dari kegiatan induknya dan data yang tersedia juga sulit untuk dipisahkan, misalnya tanker-tanker yang diusahakan oleh angkutan khusus lainnya.

Data indikator produksi diperoleh dari Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng dan BPS (Statistik Perhubungan). Sedangkan indikator harga diperoleh dari SKIO dan Survei Khusus Sektor.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi (jumlah barang dan penumpang yang diangkut). Output atas dasar harga konstan dihitung dengan metode ekstrapolasi. Sedangkan nilai tambah bruto diperoleh dengan cara perkalian antara rasio nilai tambah bruto dengan outputnya.

7.3 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta penyeberangan dengan alat angkutan ferry. Termasuk juga disini kegiatan penyewaan/*charter* kapal baik dengan maupun tanpa pengemudi. Tidak termasuk kegiatan lain yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti pelabuhan sungai, perbaikan dan pemeliharaan kapal, baik yang dilakukan dibawah satu kesatuan usaha dengan angkutan sungai maupun secara terpisah.

7.4 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di daerah tersebut. Termasuk disini kegiatan lainnya yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang datanya sulit dipisahkan, seperti EMKU (Ekpedisi Muatan Kapal Udara) dan lain-lain baik penerbangan dalam negeri maupun angkutan penerbangan luar negeri. Tidak termasuk kegiatan penerbangan yang dilakukan oleh instansi/perkumpulan yang sifatnya tidak terbuka untuk umum.

Sumber data indikator produksi diperoleh dari BPS, sedangkan data indikator harga diperoleh dari masing-masing perusahaan penerbangan yang berusaha di wilayah domestik.

7.5 Jasa Penunjang Angkutan

Kegiatan yang dicakup disini adalah kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan seperti jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal dan parkir), bongkar muat laut dan darat, keagenan penumpang, ekspedisi laut dan udara, jalan tol, dan jasa penunjang lainnya (pengerukan dan pengujian kelayakan angkutan laut).

a. Terminal dan Perparkiran

Mencakup kegiatan pemberian pelayanan pengaturan lalu lintas kendaraan/armada yang membongkar atau mengisi muatan baik barang maupun penumpang, seperti kegiatan terminal dan parkir, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan pelabuhan sungai. Pelayanan yang disediakan di pelabuhan laut meliputi fasilitas berlabuh, tempat tandu, distribusi air tawar, serta kegiatan pencatatan muatan barang dan penumpang.

b. Bongkar Muat

Kegiatan bongkar muat mencakup pemberian pelayanan bongkar muat angkutan barang melalui laut dan darat. Indikator produksi untuk bongkar muat melalui laut adalah jumlah barang yang dibongkar dan dimuat, yang datanya bersumber dari BPS dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan indikator harganya menggunakan hasil dari Survei Khusus Input Output. Indikator bongkar muat melalui darat adalah jumlah kendaraan barang umum wajib uji yang datanya bersumber dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

c. Keagenan

Mencakup pelayanan keagenan barang dan penumpang yang diberikan kepada usaha angkutan, baik angkutan darat, udara, sungai dan laut.

d. Pergudangan

Kegiatan pergudangan mencakup pemberian jasa penyimpanan barang, dalam suatu bangunan ataupun di lapangan terbuka dalam wilayah suatu pelabuhan laut. Data mengenai jumlah ton barang yang dilayani diperoleh dari statistik ekspor dan impor (BPS), dan untuk bongkar muat pelayaran nusantara dari statistik antar pulau (BPS).

Metode estimasi nilai tambah bruto menggunakan pendekatan produksi. Sumber data yang digunakan untuk kegiatan ini adalah dari BUMN/BUMD terkait, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (untuk indikator produksi) dan survei-survei khusus (untuk indikator harga).

7.6 Komunikasi

Sub sektor komunikasi mencakup kegiatan pos dan giro, telekomunikasi, dan jasa penunjang komunikasi.

a. Pos dan Giro

Pos mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan paket pos yang diusahakan oleh PT. Pos Indonesia. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan pada data produksi dan struktur biaya yang diperoleh dari Neraca Rugi Laba Perusahaan Negara Pos Indonesia. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara ekstrapolasi, menggunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim dan barang yang dipaketkan.

b. Telekomunikasi

Mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telpon dan telekomunikasi yang diusahakan oleh PT.Telkom.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan pendekatan produksi. Sumber data indikator produksi (pulsa dan menit untuk telepon dan kata untuk telegram) dari Perusahaan Provider terkait dan data harganya bersumber dari BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang meliputi jumlah pulsa otomatis, menit interlokal, jumlah menit radio telepon, banyaknya kata telegram dan sebagainya.

Jasa penunjang komunikasi meliputi: warung telekomunikasi (wartel), radio panggil (pager), dan telepon seluler (ponsel). Data produksi dan data harga bersumber dari Survei Khusus Pendapatan Regional dan Laporan Tahunan Koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM untuk wartel yang diusahakan oleh Koperasi.

Metode estimasi nilai tambah menggunakan pendekatan produksi dan pendapatan tergantung ketersediaan data. Data pada masing-masing wartel, rasio nilai tambah terhadap output diperoleh dari Survei Khusus Input Output.

8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

8.1 Bank

Kegiatan yang dicakup dalam Sub Sektor ini adalah kegiatan pemberian jasa keuangan pada pihak lain seperti: menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek, menengah atau panjang, mengirim uang, membeli dan menjual (surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya), menyediakan tempat penyimpanan barang berharga dan sebagainya.

Output dari usaha perbankan adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, biaya pengiriman wesel dan sebagainya. Apabila output hanya didasarkan pada jasa pelayanan yang benar-benar diterima bank, maka bank tidak akan mampu menutupi biaya operasionalnya. Karena itu dalam output bank dimasukkan pula imputasi jasa bank yang besarnya sama dengan selisih antara bunga yang diterima dengan bunga yang dibayarkan.

Dengan demikian, output bank mencakup jasa pelayanan bank dan imputasi jasa, yang terdiri atas : imputasi jasa, penerimaan netto dari transaksi devisa, provisi, komisi, pendapatan operasional lainnya (output maupun struktur inputnya diperoleh langsung dari Bank Indonesia).

8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank

Mencakup kegiatan asuransi, dana pensiun, pegadaian, *money changer*, koperasi simpan pinjam dan lembaga pembiayaan (sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembayaran konsumen dan kartu kredit).

Perhitungan output dan nilai tambah asuransi atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pendapatan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Soppeng. Nilai tambah bruto atas dasar harga konsumen diperoleh dengan cara mendeflasi nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dengan indeks harga konsumen.

Untuk beberapa perusahaan yang tidak tersedia laporan pendapatan dan pengeluarannya dihitung dengan pendekatan produksi yaitu dengan mengalikan jumlah indikator produksi dengan setiap indikator harganya yaitu rata-rata output per perusahaan.

8.3 Sewa Bangunan

Mencakup usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan, serta usaha persewaan tanah persil.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran rumah tangga per kapita untuk sewa tanah, kontrak rumah, sewa beli, rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari hasil Susenas dan hasil Sensus Penduduk. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan. Karena data belum tersedia maka output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal masih tercakup dalam besaran *Mark Up* yang digunakan untuk sub sektor sewa bangunan.

8.4 Jasa Perusahaan

Mencakup kegiatan pemberian jasa hukum (advokat dan notaris), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan data, jasa bangunan/arsitek dan tehnik, jasa periklanan dan riset pemasaran, jasa persewaan mesin dan peralatan. Semua jasa ini biasanya diberikan berdasarkan sejumlah bayaran atau kontrak.

Output jasa perusahaan diperoleh dari perkalian antara indikator produksi (jumlah perusahaan atau tenaga kerja) dengan indikator harga (rata-rata output per perusahaan atau rata-rata output per tenaga kerja).

Indikator produksi diperoleh dari pengumpulan data sekunder yang dilakukan BPS, sedangkan indikator harga diperoleh dari Survei Khusus Input Output. Output dan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara deflasi, dengan indeks harga konsumen sebagai deflatornya.

9. Jasa-Jasa

9.1 Pemerintahan Umum

Sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan mencakup semua departemen dan non departemen, badan/lembaga tinggi negara, kantor-kantor dan badan-badan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan pertahanan. Termasuk juga kegiatan yang bersifat jasa seperti sekolah-sekolah pemerintah, universitas pemerintah, rumah sakit pemerintah, bimbingan masyarakat terasing, museum, perpustakaan, tempat-tempat yang dibiayai dari keuangan pemerintah, dimana pemerintah memungut pembayaran yang pada umumnya tidak mencapai biaya yang dikeluarkan.

Jasa pemerintah lainnya terdiri dari jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa kemasyarakatan lainnya dan jasa hiburan dan kebudayaan. Belanja pegawai guru pemerintah yang tugasnya mengajar dikategorikan sebagai jasa pendidikan, sedangkan belanja pegawai guru pemerintah yang memegang tata usaha dikategorikan sebagai administrasi pemerintah.

Belanja pegawai dari sektor pemerintah terdiri dari gaji pokok beserta tunjangan, honorarium dan belanja pegawai dari belanja pembangunan yang ditransfer ke belanja rutin, seperti pembayaran honorarium Pegawai Negeri yang turut dalam kegiatan belanja tidak langsung, dimana kegiatan tersebut tidak menghasilkan yang berbentuk fisik. Kegiatan ini meliputi semua tingkat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa termasuk angkatan bersenjata.

Sedangkan belanja pegawai jasa pemerintah lainnya terdiri dari belanja pegawai yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, baik rutin maupun pembangunan untuk guru-guru sekolah negeri, rumah sakit pemerintah, bimbingan masyarakat terasing, perpustakaan, tempat-tempat rekreasi serta museum pemerintah.

Penyusutan barang modal untuk sektor pemerintahan umum datanya belum tersedia, sehingga nilai penyusutan dilakukan estimasi berdasarkan belanja pegawai. Struktur biaya dari sektor pemerintah tidak memuat unsur surplus usaha. Sedangkan pemerintah tidak melakukan pembayaran pajak tak langsung, untuk memperoleh nilai tambah bruto diperkirakan dari penjumlahan belanja pegawai serta perkiraan penyusutan.

Estimasi nilai tambah bruto sektor pemerintahan umumnya didasarkan pada pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai dan perkiraan penyusutan. Belanja pegawai jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan yang tercakup pada pengeluaran pemerintah pusat dan daerah, baik rutin maupun pembangunan dipisahkan dari sektor pemerintah lainnya.

Perkiraan nilai tambah bruto sektor pemerintah umum atas dasar harga konstan dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri menurut golongan kepangkatan.

9.2 Jasa Sosial Kemasyarakatan

Meliputi jasa pendidikan, kesehatan, riset/penelitian, palang merah, panti asuhan, panti wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat (YPAC), rumah ibadah dan sejenisnya.

Output jasa sosial kemasyarakatan diperoleh dari hasil perkalian antara masing-masing indikator produksi seperti jumlah murid menurut jenjang pendidikan, jumlah tempat tidur rumah sakit, jumlah dokter, jumlah anak yang diasuh, jumlah orang lanjut usia yang dirawat dengan rata-rata output per masing-masing indikator produksi.

Struktur input jasa sosial kemasyarakatan diperoleh dari hasil survei (SKIO), sedangkan data produksi diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Laporan Kegiatan Palang Merah Indonesia dan data sekunder lainnya yang dikumpulkan oleh BPS.

Output nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan mendeflasi output dan nilai tambah atas dasar harga berlaku dengan masing-masing indeks harga yang sesuai.

9.3 Jasa Hiburan dan Rekreasi

Meliputi kegiatan produksi dan distribusi film komersil dan dokumenter untuk kepentingan pemerintah serta film, video, jasa bioskop dan panggung hiburan, studio radio, perpustakaan, museum, kebun binatang, gedung olah raga, kolam renang, klub malam, taman hiburan, lapangan golf, lapangan tenis, bilyard, klub galatama, artis film, artis panggung, pub, bar, karaoke, video klip, studio televisi dan pemancar radio, pusat kebugaran dan pramuwisata yang dikelola swasta.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi, yaitu dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga, sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode

deflasi/ekstrapolasi dengan deflator /ekstrapolatornya adalah indeks harga konsumen hiburan dan kebudayaan atau indeks produksi yang sesuai.

9.4 Jasa Perseorangan dan Rumah Tangga

Meliputi segala jenis kegiatan jasa yang pada umumnya melayani perorangan dan rumah tangga, yang terdiri dari :

1. Jasa Perbengkelan/repairasi kendaraan bermotor, mencakup perbaikan kecil-kecilan kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua.
2. Jasa perbengkelan/repairasi lainnya seperti perbaikan/repairasi jam, televisi, radio, lemari es, mesin jahit, sepeda dan barang-barang rumah tangga lainnya.
3. Jasa pembantu rumah tangga, mencakup koki, tukang kebun, penjaga malam, pengasuh bayi dan anak, dan sejenisnya.
4. Jasa perorangan lainnya, mencakup binatu, tukang cukur, tukang jahit, tukang semir sepatu dan sejenisnya.

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perbengkelan serta jasa perorangan dan rumah tangga diperoleh dari perkalian antara masing-masing indikator produksi dengan indikator harganya. Indikator produksinya adalah jumlah tenaga kerja dan indikator harganya adalah rata-rata output per tenaga kerja.

Struktur input diperoleh dari Survei Khusus Input Output yang dilengkapi dengan data pendukung dari sumber data lainnya. Populasi dikumpulkan dari data sekunder oleh BPS. Output dan nilai tambah atas dasar harga konstan menggunakan metode ekstrapolasi.

2.1 PERKEMBANGAN EKONOMI

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan alat yang dapat digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah. Dengan melakukan perbandingan angka PDRB antar tahun, dapat dilihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat adanya aktifitas perekonomian selama kurun waktu satu tahun berjalan dalam wilayah tersebut. Dari data PDRB juga dapat dicermati struktur perekonomian serta tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi). PDRB juga menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran suatu wilayah.

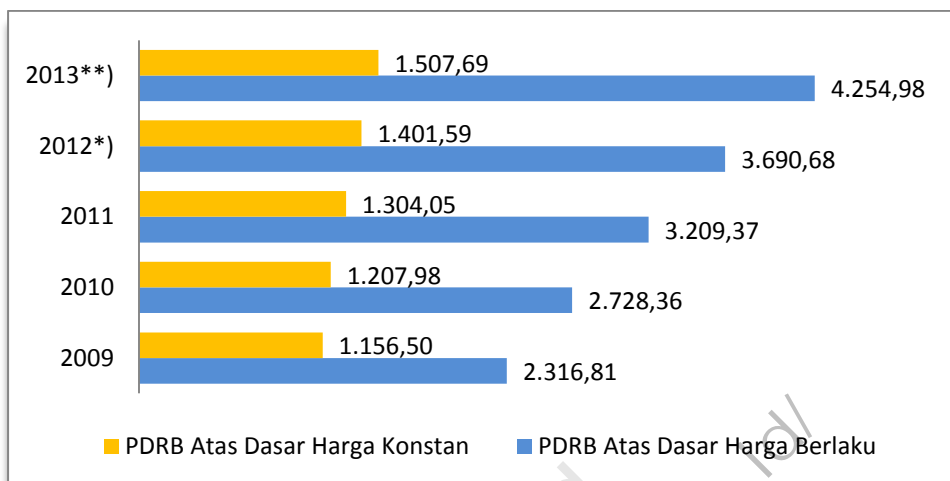
Melihat begitu banyak hal yang bisa diperoleh dari pemanfaatan data PDRB tersebut, maka data PDRB selalu digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu variabel yang dipertimbangkan untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan, terutama pembangunan ekonomi. Dengan memanfaatkan data PDRB pula pemerintah bisa juga melakukan evaluasi akan kinerja atas program-program kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun berjalan.

Mengacu pada perkembangan Produk Domestik Regional Bruto sebagai salah satu indikator makro ekonomi, perekonomian di Kabupaten Soppeng pada tahun 2013 mengalami perkembangan. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai 4,25 trilyun rupiah. Angka tersebut bertambah cukup signifikan sebesar 564,3 milyar rupiah atau naik 15,29 persen dibanding tahun 2012.

Selama lima tahun terakhir PDRB Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada grafik 1. Jika pada tahun 2009 PDRB Kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku berada pada angka 2,31 trilyun rupiah, tahun 2013 telah mencapai 4,25 trilyun rupiah. PDRB Kabupaten Soppeng atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 PDRB Kabupaten Soppeng atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai angka 1,5 trilyun rupiah atau naik sekitar 7,57 persen dibanding tahun 2012.

Dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan dari PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan tersebut memperlihatkan bahwa pada periode 2009-2013 Kabupaten Soppeng telah mampu mengembangkan dan meningkatkan perekonomian wilayahnya. Pengelolaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Soppeng juga menunjukkan trend cukup baik yang terlihat dari pertumbuhan PDRB yang positif.

Grafik 1. PDRB Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2013 (milyar Rupiah)



*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.1
Perkembangan PDRB Sulawesi Selatan dan PDRB
Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2009 – 2013

Tahun	PDRB atas dasar Harga Berlaku (milyar rupiah)				Persentase Soppeng thd Sulawesi Selatan kol (4)/(2)
	Sulawesi Selatan	Perkembangan (%)	Soppeng	Perkembangan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2009	99 954,59	17,34	2 316,92	18,95	2,32
2010	117 862,21	17,91	2 728,36	17,76	2,31
2011	137 389 81	16,57	3 209,37	17,63	2,33
2012*	159 427,09	16,04	3 690,68	15,00	2,31
2013**	184 783,06	15,90	4 254,98	15,29	2,30
Rata-rata	--	16,75	--	16,92	--

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 2.1, PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng selama kurun waktu 2009-2013 mengalami perkembangan positif. Secara rata-rata, selama periode 2009-2013 PDRB Kabupaten Soppeng telah mengalami perkembangan sekitar 16,92 persen. Angka ini relatif lebih tinggi dibanding rata-rata perkembangan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 yang berada di kisaran 16,75 persen.

Dilihat dari sisi besaran PDRB, *share* PDRB Soppeng terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Selatan relatif kecil, hanya sekitar 2,30 persen dari total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Penyumbang PDRB terbesar adalah kota Makassar, dengan *share* sebesar 31,82 persen dari total PDRB Sulawesi Selatan. Sedangkan secara rata-rata masing-masing kabupaten/kota memberikan *share* sekitar 1 hingga 6 persen terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan.

Besaran PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Soppeng pada tahun 2013 masih menduduki peringkat 13 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, seperti yang terjadi tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Soppeng tahun 2013 ini juga menduduki peringkat yang sama dari tahun sebelumnya yakni peringkat 12 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Perbandingan PDRB Kabupaten Soppeng
dengan Beberapa Kabupaten Terdekat Tahun 2013

Kabupaten	PDRB (milyar rupiah)		Peringkat Se-Sulsel	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sidrap	5 642,35	1 984,71	10	10
Soppeng	4 254,98	1 507,69	13	12
Wajo	8 941,54	3 189,60	4	5
Bone	11 788,87	3 910,25	3	3
Barru	2 503,11	910,80	23	21

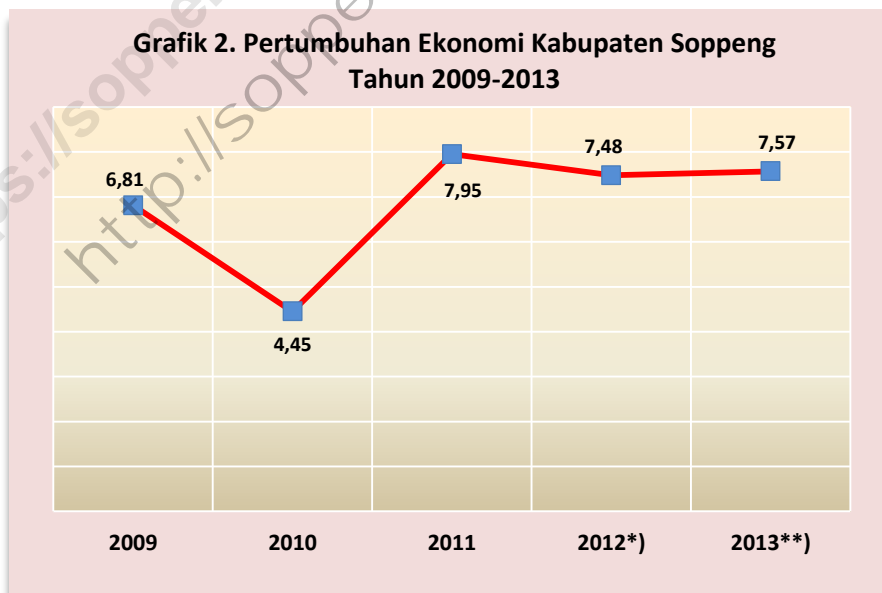
Besaran PDRB Kabupaten Soppeng baik menurut harga berlaku maupun konstan berada pada peringkat pertengahan dari total 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Dari keempat kabupaten terdekat Soppeng, angka PDRB Kabupaten Bone, Wajo dan Sidrap tercatat lebih besar dari besaran PDRB Kabupaten Soppeng. Hal ini terkait dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing kabupaten yang berpengaruh pada proses penciptaan nilai tambah sektor ekonomi dan pada akhirnya menentukan besaran PDRB kabupaten.

2.2 PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Nilai PDRB yang digunakan merupakan nilai PDRB atas dasar harga konstan, dengan mengeluarkan pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng tercatat sebesar 7,57 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dimaknai bahwa nilai total barang dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Soppeng pada tahun 2013 meningkat sebesar 7,57 persen dibanding tahun 2012, dengan catatan tidak ada faktor perubahan harga (menggunakan harga konstan tahun dasar 2000). Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2013 ini meningkat tipis sebesar 0,09 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang berada pada angka 7,48 persen.

Perekonomian Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang cukup fluktuatif seperti terlihat pada grafik 2 dibawah ini. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng ini sangat dipengaruhi oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng. Kabupaten Soppeng merupakan daerah agraris yang menonjolkan pertanian sebagai pilar utama ekonomi atau dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tergantung pada pertumbuhan sektor pertanian.



*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Secara rata-rata, selama periode 2009 hingga 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng berkisar pada angka 6,85 persen. Hal ini berarti angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7,57 persen pada tahun 2013 masih berada di atas angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng 2009-2013, seperti pada tabel 2.3 berikut. Dengan demikian kinerja perekonomian Kabupaten Soppeng tahun 2013 dapat dikatakan berhasil bila dibandingkan dengan rata-rata kinerja perekonomian lima tahun terakhir.

Tabel 2.3
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2013

Tahun	Harga Konstan	
	Jumlah (milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2009	1 156,50	6,81
2010	1 207,98	4,45
2011	1 304,05	7,95
2012*)	1 401,59	7,48
2013**)	1 507,69	7,57
Rata-Rata	--	6,85

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng
dengan Sulawesi Selatan dan Beberapa Kabupaten Terdekat
Tahun 2012-2013 (persen)

Kabupaten	2012*)	2013**)	Peningkatan
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Wajo	8.99	8.01	-0.98
2. Sidrap	8.37	7.44	-0.93
3. Soppeng	7.48	7.57	0.09
4. Bone	8.01	6.09	-1.92
5. Barru	7.76	7.81	0.05
6. Sulawesi Selatan	8.37	7,65	-0.72

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pada tabel 2.4 terlihat pertumbuhan ekonomi tahun 2013 baik total Sulawesi Selatan maupun kabupaten di sekitar Soppeng cenderung melambat apabila dibandingkan tahun 2012. Hanya Kabupaten Soppeng dan Barru yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang lebih tinggi dibanding tahun 2012, selebihnya rata-rata mengalami perlambatan sekitar 1 persen, bahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone melambat hingga hampir 2 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan produksi pertanian terutama subsektor tanaman pangan memberikan andil cukup besar terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 ini.

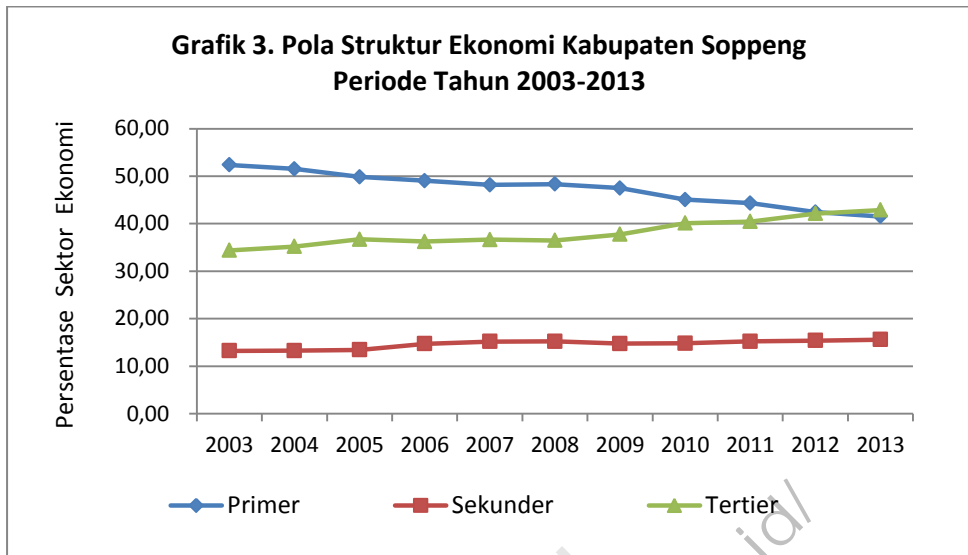
2.3 STRUKTUR EKONOMI

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB Kabupaten Soppeng tahun 2013 diperoleh angka distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor, yang menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah.

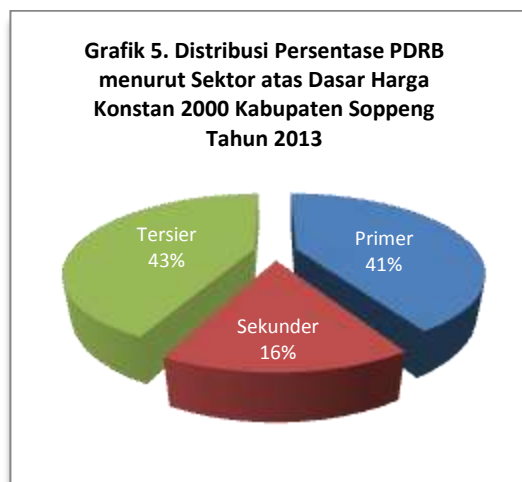
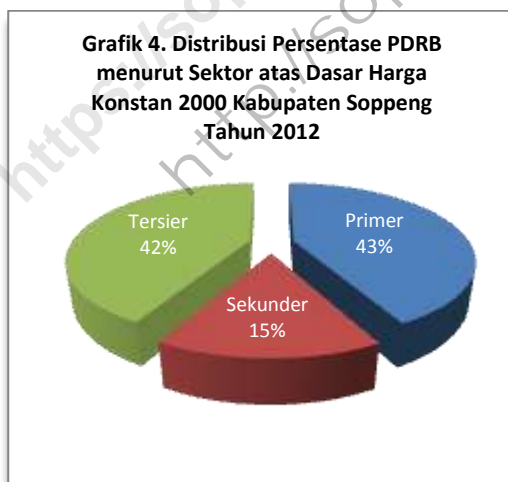
Semakin besar persentase pembentukan PDRB suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian daerah itu sendiri. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sektor primer yang meliputi pertanian dan penggalian; sektor sekunder meliputi industri pengolahan, listrik gas air dan bangunan; serta sektor tersier yang terdiri atas perdagangan, transportasi dan jasa.

Pada periode 2003 hingga 2013 struktur perekonomian Kabupaten Soppeng didominasi oleh sektor pertanian, yang berarti bahwa basis perekonomian Kabupaten Soppeng adalah sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian makin menurun dari tahun ke tahun sehingga struktur ekonomi mengalami pergeseran ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kondisi tersebut, mengindikasikan telah terjadi transformasi ekonomi di Kabupaten Soppeng. Transformasi ekonomi ke arah perekonomian berbasis industri dan jasa berlangsung seiring dengan perkembangan teknologi, informasi serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Gambaran perubahan struktur ekonomi ini selayaknya dapat dijadikan masukan guna peningkatan kinerja sektor pertanian mengingat sektor pertanian merupakan sektor utama yang mampu menyerap 65 persen dari total tenaga kerja di Kabupaten Soppeng. (Sakernas, BPS 2013)

Kontribusi sektor primer terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Soppeng pada tahun 2003 sebesar 52,38 persen, angka ini menurun tiap tahunnya hingga pada tahun 2013 berada di level 41,53 persen. Penurunan kontribusi sektor primer ini dibarengi dengan peningkatan kontribusi sektor sekunder dari 13,23 persen pada tahun 2003 menjadi 15,59 pada tahun 2013. Terlebih lagi, peran sektor tersier juga meningkat cukup signifikan dari 34,39 persen untuk tahun 2003 naik hingga 42,88 persen pada tahun 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati grafik 3 berikut ini.



Pada Grafik 4 dan 5 dibawah ini, terlihat perbandingan peranan kelompok sektor dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Soppeng tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2012 sektor primer memberikan andil sebesar 43 persen dari total PDRB Kabupaten Soppeng, namun *share* tersebut menurun menjadi 41 persen terhadap total nilai tambah tahun 2013. Penurunan *share* sektor primer tersebut dibarengi dengan kenaikan *share* sektor sekunder dan tersier. Sektor tersier menjadi sektor dengan *share* terbesar mencapai 43 persen terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng pada tahun 2013 ini. Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat jelas besaran dan arah transformasi ekonomi yang terjadi di Kabupaten Soppeng dalam dua tahun ini.



Secara detail, pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan nilai total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Soppeng sekitar 38,26 persen. Besarnya kontribusi sektor pertanian ini erat kaitannya dengan peran subsektor Tanaman Bahan Makanan dan subsektor Perkebunan dengan peranan masing-masing 26,96 persen dan 7,09 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku.

Sektor lain yang cukup besar perannya terhadap perekonomian di Kabupaten Soppeng pada tahun 2013 masing-masing adalah sektor jasa-jasa sebesar 22,65 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,14 persen. Sedangkan penyumbang terkecil terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng tahun 2013 adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,51 persen.

Tabel 2.5
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2013 (dalam persen)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	45,37	42,46	41,25	39,45	38,26
2. Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,50	0,53	0,52	0,51
3. Industri Pengolahan	6,41	6,26	6,32	6,23	6,24
4. Listrik, Gas dan Air	0,89	0,86	0,84	0,88	0,87
5. Bangunan	6,02	5,69	5,95	5,70	5,68
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,74	11,52	12,14	13,38	14,14
7. Angk, Pergudangan, Komunikasi	4,23	4,43	4,57	4,99	5,10
8. Lemb. Keuangan, Jasa Perusahaan	5,61	5,52	5,93	6,20	6,55
9. Jasa – Jasa	20,21	22,76	22,48	22,65	22,65
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

2.4 PDRB PERKAPITA

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan, baik sebagai pendukung maupun yang langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan. Salah satu indikator makro untuk pengukuran tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Besaran PDRB per kapita memberikan gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah.

Tabel 2.6
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan
Harga Konstan 2000 Kabupaten Soppeng 2009-2013

Tahun	PDRB Perkapita (juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Harga berlaku	Harga Konstan	Harga berlaku	Harga Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	10,36	5,17	18,82	6,69
2010	12,15	5,38	17,25	4,00
2011	14,28	5,80	17,53	7,86
2012*	16,39	6,22	14,79	7,29
2013**	18,87	6,68	15,14	7,42
Rata-Rata Pertumbuhan (2009-2013)			16,70	6,65

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pada tabel 2.6, dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2009–2013 PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita Kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku tahun 2013 telah mencapai 18,87 juta rupiah. Hal ini dapat diartikan bahwa tiap penduduk di wilayah Soppeng ini mampu memberikan kontribusi nilai tambah secara ekonomi sebesar 18,87 juta rupiah selama tahun 2013. Angka PDRB perkapita tahun 2013 mengalami perkembangan sebesar 15,14 persen dari nilai PDRB per kapita tahun 2012 yang tercatat sebesar 16,39 juta rupiah.

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Soppeng secara riil yang digambarkan dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 mencatatkan kenaikan sebesar 7,42 persen untuk tahun 2013 dengan besaran mencapai 6,68 juta rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga konstan ini lebih mencerminkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.

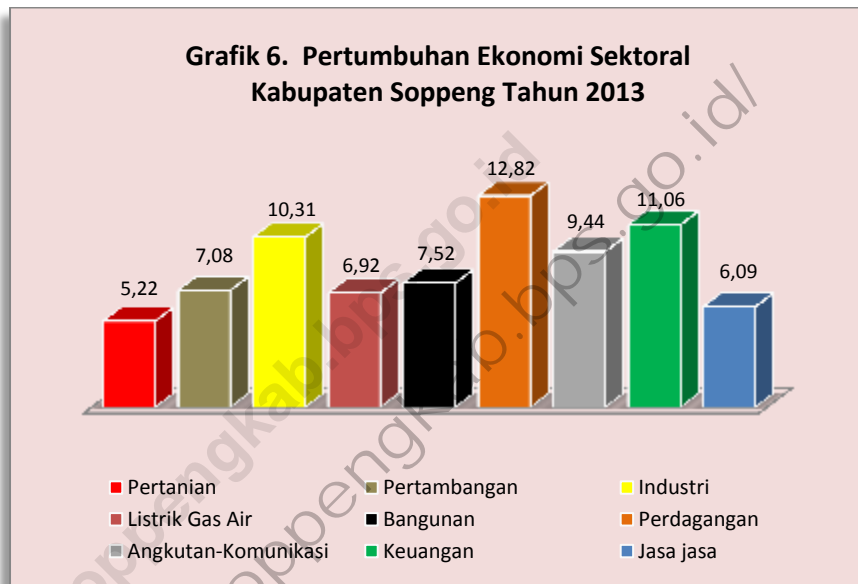
PDRB Perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menduduki peringkat 9 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten terdekat, PDRB perkapita Kabupaten Soppeng berada di kisaran pertengahan. PDRB perkapita Soppeng lebih tinggi dibanding PDRB perkapita Kabupaten Bone dan Barru serta lebih rendah dari PDRB perkapita Kabupaten Wajo dan Sidrap. Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Soppeng dengan kabupaten terdekatnya yaitu Kabupaten Bone, Wajo, Sidrap dan Barru tersaji dalam tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Beberapa Kabupaten di Sekitar Soppeng Tahun 2013

Kabupaten	PDRB Perkapita (juta Rupiah)		Peringkat Se-Sulsel	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Wajo	22,89	8,17	4	5
2. Sidrap	19,92	7,01	7	8
3. Soppeng	18,87	6,69	9	9
4. Bone	16,06	5,33	15	15
5. Barru	14,78	5,38	17	14

Pada kenyataannya, kenaikan PDRB perkapita menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan jasa terutama yang dikonsumsi oleh publik pada tahun 2013. Baik secara langsung maupun tak langsung kenaikan harga barang-barang dan jasa tersebut pasti dirasakan masyarakat sehingga mengakibatkan perlunya kemampuan yang lebih terutama dari sisi ekonomi untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, PDRB perkapita sebagai salah satu indikator pengukuran kemakmuran masih memiliki beberapa kelemahan sehingga diperlukan dukungan indikator lain untuk mendapatkan hasil pengukuran kesejahteraan yang lebih mendekati riil.

Pertumbuhan PDRB menurut harga konstan diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi secara riil karena tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan riil setiap sektor kegiatan ekonomi dihitung dari besar kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya.



Dari sisi sektoral, ekonomi di Kabupaten Soppeng tahun 2013 tumbuh positif untuk semua sektor lapangan usaha dengan besaran yang bervariasi seperti terlihat pada grafik 6 diatas. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 yang mencapai 12,82 persen, diikuti sektor Keuangan, Jasa dan Persewaan sebesar 11,06 persen dan sektor industri yang tumbuh 10,31 persen. Sektor Pertanian pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,22 persen dari tahun 2012. Sedangkan dalam lima tahun terakhir, secara rata-rata sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami pertumbuhan tertinggi hingga 13,23 persen.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan tiap Sektor di Kabupaten Soppeng
Tahun 2009–2013 (dalam persen)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*	2013**	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	4,97	-1,00	6,11	2,85	5,22	3,63
2. Pertambangan dan Penggalian	2,78	10,31	12,55	6,99	7,08	7,94
3. Industri Pengolahan	9,20	5,03	8,32	9,47	10,31	8,47
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	4,59	6,65	9,06	16,98	6,92	8,84
5. Bangunan	-2,06	4,47	14,08	6,96	7,52	6,19
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,02	12,04	14,97	19,60	12,82	14,29
7. Angkutan Pergudangan, Komunikasi	9,34	12,23	10,25	14,93	9,44	11,24
8. Lemb. Keuangan, Jasa Perusahaan	8,49	7,68	13,74	16,36	11,06	11,47
9. Jasa –Jasa	10,89	11,08	2,91	4,13	6,09	7,02
PDRB	6,81	4,45	7,95	7,48	7,57	6,85

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

3.1 SEKTOR PERTANIAN

Sektor ini terdiri dari 5 subsektor yaitu tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan subsektor perikanan. Pertumbuhan riil masing-masing subsektor selama periode 2009 hingga 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Pertumbuhan Riil tiap Subsektor pada Sektor Pertanian
Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2013 (dalam persen)

Sub Sektor	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanaman Bahan Makanan	7,68	2,33	6,76	0,47	4,76
Tanaman Perkebunan	-0,58	-10,29	2,63	7,81	5,54
Peternakan	1,86	2,05	11,80	8,67	4,17
Kehutanan	2,50	8,15	9,74	4,84	1,31
Perikanan	3,60	0,46	8,81	7,18	9,97
Pertanian	4,97	-1,00	6,11	2,85	5,22

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2013 geliat sektor pertanian menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, dengan pertumbuhan riil sebesar 5,22 persen. Angka ini meningkat sekitar 2,37 persen dibanding tahun 2012 yang mencatatkan pertumbuhan sektor pertanian pada kisaran 2,85 persen per tahun. Peningkatan kinerja sektor pertanian ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan yang mengalami kenaikan, serta pertumbuhan positif tanaman perkebunan dan perikanan.

Pada tabel 3.3 berikut tampak peningkatan produksi dari beberapa komoditi subsektor tanaman bahan makanan, terutama padi dan kedelai. Kenaikan ini disebabkan adanya pencetakan sawah baru swadaya petani tahun 2013 yang dilakukan hampir di setiap kecamatan di Soppeng. Disamping itu, pemerintah daerah juga turut berperan dalam perbaikan dan perluasan saluran irigasi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil produksi pertanian.

Tabel 3.3
Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Soppeng
Tahun 2009-2013 (dalam Ton)

Komoditas	2009	2010	2011	2012	2013*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Padi	279 434	259 668	260 220	269 826	275 164
2. Jagung	34 154	48 906	48 881	43 982	27 201
3. Ubi Kayu	4 311	1 046	999	2 100	2 027
4. Ubi Jalar	335	252	304	471	397
5. Kacang Tanah	497	731	1 030	450	764
6. Kacang Hijau	336	196	1 794	272	545
7. Kedelai	3 262	2 507	4 640	3 990	7 858

*) Angka Sementara

Subsektor tanaman perkebunan pada tahun 2013 juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya. Tanaman perkebunan terutama kakao mampu meningkatkan nilai tambah sekitar 5,54 persen dibanding tahun 2012. Kakao merupakan tanaman perkebunan potensial yang berorientasi ekspor, namun demikian perkebunan kakao di Soppeng terlihat masih sebatas usaha rumah tangga serta masih tergantung cuaca dan gangguan hama, sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Jika pemerintah lebih serius untuk mengembangkan perkebunan kakao ini, bukan tidak mungkin kedepannya akan lebih mampu menggenjot nilai tambah sektor pertanian.

Selanjutnya, subsektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu subsektor perikanan. Perikanan yang ada di Soppeng terbatas hanya pada perikanan perairan darat saja karena Soppeng tidak memiliki wilayah laut. Secara umum hasil perikanan di Soppeng hanya dapat memenuhi sekitar 60 persen dari kebutuhan total masyarakat, selebihnya diperoleh dari luar wilayah Soppeng seperti Kabupaten Bone. Namun demikian, perkembangan subsektor perikanan selama tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik, hingga tahun 2013 subsektor perikanan tumbuh mencapai 9,97 persen dibanding tahun 2012. Hal ini terkait dengan pengembangan budidaya perikanan darat dan perikanan tangkap untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap hasil perikanan.

Subsektor peternakan tumbuh melambat pada tahun 2013 yaitu sebesar 4,17 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai 8,67 persen. Pada tahun 2013 ini terjadi peningkatan populasi ternak sapi dan ayam, namun kenaikannya tidak sebesar kenaikan tahun sebelumnya. Hal inilah yang berimplikasi pada melambatnya pertumbuhan riil subsektor peternakan.

Demikian juga subsektor kehutanan, pada tahun 2013 hanya tumbuh sekitar 1,31 persen, sedangkan tahun 2012 mencapai 4,84 persen. Produksi kayu jati yang menurun pada tahun 2013 ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan subsektor kehutanan, namun hal ini diimbangi dengan peningkatan produksi kayu jenis lainnya yaitu kayu rimba campuran, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan pada subsektor ini meskipun dalam jumlah yang kurang signifikan.

3.2 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 7,08 persen pada tahun 2013. Besaran ini tercatat meningkat tipis dari angka 6,99 persen pada tahun 2012, sebagai akibat meningkatnya produksi penggalian di Soppeng, terutama penggalian pasir. Peningkatan pertumbuhan sektor ini memperlihatkan potensi alam Soppeng mampu memberikan hasil yang lebih optimal, walaupun secara teknis masih sangat tergantung cuaca dan curah hujan.

3.3 SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Pada umumnya industri yang berkembang di Soppeng merupakan industri kecil dan industri rumah tangga, outputnya hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal. Pada tahun 2013, pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Soppeng relatif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 9,47 persen pada tahun 2012 naik menjadi 10,31 persen pada tahun 2013. Industri makanan minuman dan tembakau yang meningkat sebesar 15,07 persen memberikan andil terbesar dalam peningkatan pertumbuhan pada sektor industri pengolahan.

3.4 SEKTOR LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

Sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang produksinya sangat dibutuhkan masyarakat dalam suatu wilayah. Tahun 2012, kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap perekonomian Kabupaten Soppeng relatif sangat kecil hanya sebesar 0,87 persen terhadap total PDRB. Namun demikian pertumbuhannya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat baik rumah tangga, pemerintah maupun swasta akan pasokan listrik dan air sehingga pertumbuhannya pada tahun 2013 mencapai 6,92 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan listrik yang naik signifikan dari tahun sebelumnya, hingga menciptakan pertumbuhan sebesar 7,14 persen serta dari subsektor air bersih sebesar 2,34 persen. Tahun 2013, pasokan air bersih tampak mulai normal lagi setelah tahun lalu mengalami penurunan produksi. Perbaikan mesin pompa yang rusak dan perbaikan pipa saluran air PDAM mampu menormalkan kembali produksi air bersih PDAM di Soppeng.

3.5 SEKTOR BANGUNAN

Pertumbuhan sektor bangunan pada tahun 2013 berada pada level 7,52 persen, meningkat tipis sebesar 0,56 persen dari tahun 2012 yang tercatat pada angka 6,96 persen. Pertumbuhan sebesar 7,52 persen ini dipengaruhi oleh pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan di beberapa kecamatan serta swasta dalam bentuk pembangunan perumahan dan pertokoan.

3.6 SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

Dalam beberapa tahun terakhir kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB terus meningkat. Jika pada tahun 2010 *share* sektor ini 11,52 persen maka pada tahun 2013 kontribusi telah mencapai 14,14 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 12,82 persen pada tahun 2013 terutama dimotori oleh peningkatan volume perdagangan di Kabupaten Soppeng baik perdagangan komoditi pertanian dan industri lokal maupun perdagangan komoditi impor dari luar wilayah Soppeng.

Peningkatan volume perdagangan sejalan dengan makin beragamnya kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pangan dan sandang. Jumlah warung makan, kafe dan warkop yang semakin bertambah juga cukup berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan sektor ini. Penambahan kamar, pembenahan kualitas dan peningkatan fasilitas hotel yang ada di Kabupaten Soppeng tercatat mampu meningkatkan nilai tambah subsektor hotel sebesar 8,34 persen pada tahun 2013.

3.7 SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

Trend pertumbuhan sektor angkutan dan komunikasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai angka pertumbuhan 9,44 persen pada tahun 2013. Bertambahnya jumlah kendaraan untuk angkutan, khususnya jenis roda 4 selama tahun 2013 menjadi alasan utama kenaikan nilai tambah subsektor pengangkutan. Demikian juga pada subsektor komunikasi, penggunaan telepon seluler dan internet yang kian marak meningkatkan nilai tambah subsektor ini tumbuh mencapai 13,20 persen.

3.8 SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN

Pertumbuhan riil Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan tercatat bergerak melambat dibanding tahun sebelumnya dari 16,36 persen tahun 2012 menjadi 11,06 persen pada tahun 2013. Hal ini dapat diartikan sektor ini mengalami pertumbuhan namun nilainya tidak sebesar pertumbuhan tahun 2012.

Sub sektor bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan andil dalam melambatnya pertumbuhan sektor ini. Peningkatan perputaran ekonomi dari bank dan lembaga pembiayaan di Kabupaten Soppeng mampu menggerakkan pertumbuhan subsektor ini sekitar 13 persen pertahun, angka tersebut relatif lebih kecil dibanding pertumbuhan tahun 2012 yang mencapai 23 persen per tahun.

3.9 SEKTOR JASA-JASA

Subsektor pemerintahan umum masih memberikan kontribusi yang terbesar dalam penciptaan output sektor jasa-jasa. Artinya meningkatnya sektor jasa-jasa ini lebih disebabkan oleh peran pemerintah bukan peran masyarakat secara umum yang kontribusinya mencapai 22,27 persen. Oleh karena itu, sub sektor swasta baik sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi dan perumahan dan rumah tangga yang sebenarnya cukup potensial perlu semakin ditingkatkan sehingga kontribusinya yang masih 0,38 persen bagi perekonomian Kabupaten Soppeng bisa semakin ditingkatkan.

Namun demikian, geliat subsektor swasta hiburan dan rekreasi terlihat meningkat, seiring dengan semakin ramainya tempat rekreasi bertema waterboom dan hiburan seperti pasar malam di Kabupaten Soppeng. Subsektor ini tumbuh cukup pesat tiap tahunnya dan mencapai 19,70 persen pada tahun 2013. Angka ini pun masih dimungkinkan naik di masa mendatang mengingat kebutuhan masyarakat terhadap hiburan dan rekreasi kian meningkat.

Lampiran Tabel

<https://soppengkab.bps.go.id>
<http://soppengkab.bps.go.id>

Tabel 1 PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN SOPPENG ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2011-2013 (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PERTANIAN	1 323 812,38	1 456 062,61	1 628 008,32
a. Tanaman Bahan Makanan	958 950,63	1 036 193,77	1 147 105,57
b. Tanaman Perkebunan	233 376,79	267 512,72	301 719,94
c. Peternakan	53 522,68	59 407,55	67 350,13
d. Kehutanan	7 872,86	8 949,85	9 623,11
e. Perikanan	70 089,42	83 998,72	102 204,57
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	16 902,74	19 052,75	21 894,21
- Pertambangan Migas	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
- Penggalian	16 902,74	19 052,75	21 894,21
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	202 953,62	229 807,77	265 338,01
a. Industri Migas	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas **)	202 953,62	229 807,77	265 338,01
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	145 694,32	169 798,14	203 508,69
2. Tekstil Brg Kulit & Alas Kaki	5 827,20	6 607,72	6 441,49
3. Brg Kayu & Hasil Hutan Lainnya	22 946,51	22 717,04	22 246,80
4. Kertas dan Barang Cetakan	1 085,39	1 156,61	1 206,22
5. Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	-	-	-
6. Semen & Brg Galian Bukan Logam	14 205,22	15 925,85	17 830,58
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-
8. Alat Angk Mesin & Peralatannya	-	-	-
9. Barang Lainnya	13 194,26	14 142,41	14 104,23
4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	26 959,88	32 641,09	37 107,05
- Listrik	25 043,67	30 650,79	34 957,01
- Gas Kota	-	-	-
- Air Bersih	1 916,22	1 990,30	2 150,04
5 BANGUNAN	190 968,57	210 395,95	241 589,40

Lanjutan Tabel 1

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
6. PERDAGANGAN, HOTEL & Restoran	389 496,03	493 658,77	601 595,78
- Perdagangan Besar & Eceran	313 679,49	399 230,20	497 329,57
- Hotel	925,29	1 071,45	1 254,97
- Restoran	74 891,25	93 357,12	103 011,24
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	146 539,33	184 225,59	216 934,95
a. Pengangkutan	125 370,38	155 914,01	182 687,84
1. Angkutan Rel	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	125 149,63	155 653,54	182 388,74
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	220,75	260,48	299,10
b. Komunikasi	21 168,95	28 311,58	34 247,11
1. Pos dan Telekomunikasi	21 168,95	28 311,58	34 247,11
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	190 269,99	228 956,19	278 877,79
a. Bank	88 696,00	112 209,55	142 724,04
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	10 388,73	13 277,45	15 872,77
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
d. Sewa Bangunan	88 169,80	100 040,10	116 308,62
e. Jasa Perusahaan	3 015,46	3 429,10	3 972,36
9. JASA – JASA	721 467,53	835 883,14	963 642,25
a. Pemerintahan Umum	709 242,44	821 603,67	947 455,27
1. Adm Pemerintah & Pertahanan	496 469,71	534 042,39	663 218,69
2. Jasa Pemerintah Lainnya	212 772,73	287 561,29	284 236,58
b. S w a s t a	12 225,09	14 279,47	16 186,98
1. Sosial Kemasyarakatan	5 064,56	6 227,34	7 136,49
2. Hiburan dan Rekreasi	1 308,76	1 663,14	2 090,29
3. Perorangan dan Rumah Tangga	5 851,77	6 388,99	6 960,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3 209 370,07	3 690 683,87	4 254 982,77

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 2 PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN SOPPENG ATAS DASAR HARGA KONSTAN
TAHUN 2011-2013 (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PERTANIAN	570 320,04	586 567,64	617 190,73
a. Tanaman Bahan Makanan	384 454,02	386 268,31	404 671,73
b. Tanaman Perkebunan	128 359,96	138 390,62	146 052,52
c. Peternakan	22 171,47	24 092,85	25 097,97
d. Kehutanan	2 396,08	2 512,12	2 544,91
e. Perikanan	32 938,51	35 303,74	38 823,60
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	7 782,68	8 327,03	8 916,34
- Pertambangan Migas	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
- Penggalian	7 782,68	8 327,03	8 916,34
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	97 223,43	106 434,00	117 407,90
a. Industri Migas	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas **)	97 223,43	106 434,00	117 407,90
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	65 431,58	74 620,49	85 868,65
2. Tekstil Brg Kulit & Alas Kaki	2 943,03	2 945,49	3 038,44
3. Brg Kayu & Hasil Hutan Lainnya	13 497,95	12 762,38	11 833,40
4. Kertas dan Barang Cetakan	623,79	632,03	645,04
5. Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	-	-	-
6. Semen & Brg Galian Bukan Logam	7 805,06	8 294,71	9 005,34
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-
8. Alat Angk Mesin & Peralatannya	-	-	-
9. Barang Lainnya	6 922,02	7 178,89	7 017,03
4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	10 761,99	12 589,40	13 460,81
- Listrik	10 161,07	12 015,53	12 873,50
- Gas Kota	-	-	-
- Air Bersih	600,92	573,87	587,30
5 BANGUNAN	90 601,47	96 911,10	104 197,79

Lanjutan Tabel 2

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
6 PERDAGANGAN, HOTEL & RESTAURAN	149 960,57	179 353,44	202 339,47
- Perdagangan Besar & Eceran	120 506,81	144 691,95	165 947,60
- Hotel	461,83	499,90	541,60
- Restoran	28 991,92	34 161,59	35 850,27
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	78 837,64	90 610,20	99 163,13
a. Pengangkutan	72 223,01	82 394,49	89 862,71
1. Angkutan Rel	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	72 107,28	82 262,27	89 718,80
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk Sungai, Danau & Penyebr	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	115,73	132,22	143,92
b. Komunikasi	6 614,64	8 215,71	9 300,42
1. Pos dan Telekomunikasi	6 614,64	8 215,71	9 300,42
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-
8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	80 985,31	94 234,45	104 659,24
a. B a n k	33 645,84	41 660,04	47 442,12
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	4 637,68	5 770,28	6 555,62
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
d. Sewa Bangunan	41 491,67	45 472,77	49 231,16
e. Jasa Perusahaan	1 210,12	1 331,36	1 430,35
9 JASA – JASA	217 577,51	226 561,62	240 351,09
a. Pemerintahan Umum	211 552,23	220 184,66	233 618,82
1. Adm Pemerintah & Pertahanan	135 604,98	143 120,03	149 516,04
2. Jasa Pemerintah Lainnya	75 947,25	77 064,63	84 102,78
b. S w a s t a	6 025,28	6 376,96	6 732,27
1. Sosial Kemasyarakatan	2 618,38	2 749,77	2 842,26
2. Hiburan dan Rekreasi	596,24	723,10	865,55
3. Perorangan dan Rumah Tangga	2 810,65	2 904,09	3 024,47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1 304 050,64	1 401 588,87	1 507 686,50

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 3 DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN SOPPENG ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2011-2013 (%)

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PERTANIAN	41,25	39,45	38,26
a. Tanaman Bahan Makanan	29,88	28,08	26,96
b. Tanaman Perkebunan	7,27	7,25	7,09
c. Peternakan	1,67	1,61	1,58
d. Kehutanan	0,25	0,24	0,23
e. Perikanan	2,18	2,28	2,40
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,53	0,52	0,51
- Pertambangan Migas	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
- Penggalian	0,53	0,52	0,51
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	6,32	6,23	6,24
a. Industri Migas	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas **)	6,32	6,23	6,24
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	4,54	4,60	4,78
2. Tekstil Brg Kulit & Alas Kaki	0,18	0,16	0,15
3. Brg Kayu & Hasil Hutan Lainnya	0,71	0,62	0,52
4. Kertas dan Barang Cetak	0,03	0,03	0,03
5. Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	-	-	-
6. Semen & Brg Galian Bukan Logam	0,44	0,43	0,42
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-
8. Alat Angk Mesin & Peralatannya	-	-	-
9. Barang Lainnya	0,41	0,38	0,33
4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,84	0,88	0,87
- Listrik	0,78	0,83	0,82
- Gas Kota	-	-	-
- Air Bersih	0,06	0,05	0,05
5 BANGUNAN	5,95	5,70	5,68

Lanjutan Tabel 3

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
6 PERDAGANGAN, HOTEL & RESTAURAN	12,14	13,38	14,14
- Perdagangan Besar & Eceran	9,77	10,82	11,69
- Hotel	0,03	0,03	0,03
- Restoran	2,33	2,53	2,42
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	4,57	4,99	5,10
a. Pengangkutan	3,91	4,22	4,29
1. Angkutan Rel	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	3,90	4,22	4,29
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk Sungai, Danau & Penyebr	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	0,01	0,01	0,01
b. Komunikasi	0,66	0,77	0,80
1. Pos dan Telekomunikasi	0,66	0,77	0,80
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-
8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	5,93	6,20	6,55
a. B a n k	2,76	3,04	3,35
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,32	0,36	0,37
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
d. Sewa Bangunan	2,75	2,71	2,73
e. Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09
9 JASA – JASA	22,48	22,65	22,65
a. Pemerintahan Umum	22,10	22,26	22,27
1. Adm Pemerintah & Pertahanan	15,47	14,47	15,59
2. Jasa Pemerintah Lainnya	6,63	7,79	6,68
b. S w a s t a	0,38	0,39	0,38
1. Sosial Kemasyarakatan	0,16	0,17	0,17
2. Hiburan dan Rekreasi	0,04	0,05	0,05
3. Perorangan dan Rumah Tangga	0,18	0,17	0,16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 4 DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN SOPPENG ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2011-2013 (%)

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PERTANIAN	43,73	41,85	40,94
a. Tanaman Bahan Makanan	29,48	27,56	26,84
b. Tanaman Perkebunan	9,84	9,87	9,69
c. Peternakan	1,70	1,72	1,66
d. Kehutanan	0,18	0,18	0,17
e. Perikanan	2,53	2,52	2,58
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,60	0,59	0,59
- Pertambangan Migas	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
- Penggalian	0,60	0,59	0,59
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	7,46	7,59	7,79
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas **)	7,46	7,59	7,79
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	5,02	5,32	5,70
2. Tekstil Brg Kulit & Alas Kaki	0,23	0,21	0,20
3. Brg Kayu & Hasil Hutan Lainnya	1,04	0,91	0,78
4. Kertas dan Barang Cetakan	0,05	0,05	0,04
5. Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	-	-	-
6. Semen & Brg Galian Bukan Logam	0,60	0,59	0,60
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-
8. Alat Angk Mesin & Peralatannya	-	-	-
9. Barang Lainnya	0,53	0,51	0,47
4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,83	0,90	0,89
- Listrik	0,78	0,86	0,85
- Gas Kota	-	-	-
- Air Bersih	0,05	0,04	0,04
5 BANGUNAN	6,95	6,91	6,91

Lanjutan Tabel 4

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
6 PERDAGANGAN, HOTEL & RESTAURAN	11,50	12,80	13,42
- Perdagangan Besar & Eceran	9,24	10,32	11,01
- Hotel	0,04	0,04	0,04
- Restoran	2,22	2,44	2,38
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	6,05	6,46	6,58
a. Pengangkutan	5,54	5,88	5,96
1. Angkutan Rel	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	5,53	5,87	5,95
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk Sungai, Danau & Penyebr	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	0,01	0,01	0,01
b. Komunikasi	0,51	0,59	0,62
1. Pos dan Telekomunikasi	0,51	0,59	0,62
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-
8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	6,21	6,72	6,94
a. B a n k	2,58	2,97	3,15
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,36	0,41	0,43
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
d. Sewa Bangunan	3,18	3,24	3,27
e. Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09
9 JASA – JASA	16,68	16,16	15,94
a. Pemerintahan Umum	16,22	15,71	15,50
1. Adm Pemerintah & Pertahanan	10,40	10,21	9,92
2. Jasa Pemerintah Lainnya	5,82	5,50	5,58
b. S w a s t a	0,46	0,45	0,45
1. Sosial Kemasyarakatan	0,20	0,20	0,19
2. Hiburan dan Rekreasi	0,05	0,05	0,06
3. Perorangan dan Rumah Tangga	0,22	0,21	0,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 5 INDEKS PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN SOPPENG ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2011-2013

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PERTANIAN	333,06	366,33	409,59
a. Tanaman Bahan Makanan	379,53	410,10	454,00
b. Tanaman Perkebunan	223,27	255,93	288,66
c. Peternakan	336,02	372,97	422,83
d. Kehutanan	645,98	734,35	789,59
e. Perikanan	302,95	363,07	441,76
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	438,33	494,09	567,78
- Pertambangan Migas	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
- Penggalian	438,33	494,09	567,78
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	361,83	409,71	473,05
a. Industri Migas			
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas **)	361,83	409,71	473,05
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	451,57	526,28	630,76
2. Tekstil Brg Kulit & Alas Kaki	377,90	393,50	417,74
3. Brg Kayu & Hasil Hutan Lainnya	225,95	223,69	219,06
4. Kertas dan Barang Cetakan	382,18	407,26	424,73
5. Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	-	-	-
6. Semen & Brg Galian Bukan Logam	340,08	381,27	426,87
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-
8. Alat Angk Mesin & Peralatannya	-	-	-
9. Barang Lainnya	404,79	433,85	432,68
4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	637,47	771,80	877,40
- Listrik	625,16	765,13	872,62
- Gas Kota	-	-	-
- Air Bersih	858,33	891,51	963,07
5 BANGUNAN	461,06	507,97	583,28

Lanjutan Tabel 5

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
6 PERDAGANGAN, HOTEL & RESTAURAN	620,53	786,48	958,44
- Perdagangan Besar & Eceran	572,62	728,79	907,87
- Hotel	425,56	492,78	577,18
- Restoran	963,73	1201,36	1325,59
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	367,92	462,54	544,66
a. Pengangkutan	330,03	410,44	480,92
1. Angkutan Rel	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	329,94	410,37	480,85
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk Sungai, Danau & Penyebr	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	387,21	456,89	524,64
b. Komunikasi	1 149,47	1 537,32	1 859,62
3. Pos dan Telekomunikasi	1 149,47	1 537,32	1 859,62
4. Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-
8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	714,20	859,41	1 046,80
a. B a n k	9 395,76	11 886,60	15 119,07
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	658,71	841,87	1 006,43
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
d. Sewa Bangunan	372,75	422,93	491,71
e. Jasa Perusahaan	647,18	735,95	852,55
9 JASA – JASA	668,39	774,39	892,75
a. Pemerintahan Umum	674,71	781,60	901,32
1. Adm Pemerintah & Pertahanan	761,77	819,42	1 017,62
2. Jasa Pemerintah Lainnya	532,66	719,89	711,57
b. S w a s t a	433,20	506,00	573,59
1. Sosial Kemasyarakatan	446,68	549,24	629,42
2. Hiburan dan Rekreasi	715,79	909,61	1 143,24
3. Perorangan dan Rumah Tangga	388,72	424,41	462,35
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	433,55	498,57	574,80

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 6 INDEKS PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN SOPPENG ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2011-2013

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PERTANIAN	143,49	147,57	155,28
a. Tanaman Bahan Makanan	152,16	152,88	160,16
b. Tanaman Perkebunan	122,80	132,40	139,73
c. Peternakan	139,19	151,26	157,57
d. Kehutanan	196,60	206,12	208,81
e. Perikanan	142,37	152,60	167,81
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	201,83	215,94	231,22
- Pertambangan Migas	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
- Penggalian	201,83	215,94	231,22
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	173,33	189,75	209,32
a. Industri Migas			
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas **)	173,33	189,75	209,32
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	202,80	231,28	266,15
2. Tekstil Brg Kulit & Alas Kaki	190,86	191,02	197,04
3. Brg Kayu & Hasil Hutan Lainnya	132,91	125,67	116,52
4. Kertas dan Barang Cetakan	219,65	222,55	227,13
5. Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	-	-	-
6. Semen & Brg Galian Bukan Logam	186,85	198,58	215,59
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-
8. Alat Angk Mesin & Peralatannya	-	-	-
9. Barang Lainnya	212,35	220,23	215,26
4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	254,47	297,68	318,28
- Listrik	253,65	299,94	321,36
- Gas Kota	-	-	-
- Air Bersih	269,17	257,05	263,07
5 BANGUNAN	218,74	233,98	251,57

Lanjutan Tabel 6

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
6 PERDAGANGAN, HOTEL & RESTAURAN	238,91	285,74	322,36
- Perdagangan Besar & Eceran	219,98	264,13	302,93
- Hotel	212,40	229,91	249,09
- Restoran	373,08	439,61	461,34
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	197,94	227,90	248,97
a. Pengangkutan	190,12	216,90	236,56
1. Angkutan Rel	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	190,10	216,88	236,53
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk Sungai, Danau & Penyebr	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	202,99	231,93	252,44
b. Komunikasi	359,17	446,11	505,01
1. Pos dan Telekomunikasi	359,17	446,11	505,01
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-
8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	303,99	353,72	392,85
a. Bank	3 564,18	4 413,14	5 025,65
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	294,06	365,87	415,66
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
d. Sewa Bangunan	175,41	192,24	208,13
e. Jasa Perusahaan	259,72	285,74	306,98
9 JASA – JASA	201,57	209,89	222,67
a. Pemerintahan Umum	201,25	209,46	222,24
1. Adm Pemerintah & Pertahanan	208,07	219,60	229,41
2. Jasa Pemerintah Lainnya	190,13	192,93	210,55
b. Swasta	213,51	225,97	238,56
1. Sosial Masyarakat	230,93	242,52	250,68
2. Hiburan dan Rekreasi	326,10	395,48	473,39
3. Perorangan dan Rumah Tangga	186,71	192,91	200,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	176,16	189,34	203,67

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 7 PDRB DAN ANGKA PERKAPITA KABUPATEN SOPPENG
ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2011-2013

URAIAN/Descrptions	2011 ¹⁾	2012 [*]	2013 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PDRB ATAS DASAR HARGA PASAR (Juta Rp)/ GRDP At Market Prices (Millions Rps)	3 209 370,07	3 690 683,87	4 254 982,77
2. PENYUSUTAN (Juta Rp)/ Defrecition (Millions Rps)	190 433,71	203 918,06	218 357,23
3. PDRN ATAS DASAR HARGA PASAR PDRN At Market Prices (Millions Rps)	3 018 936,36	3 486 765,81	4 036 625,54
4. PAJAK TAK LANGSUNG (Juta Rp) Net Indirect Taxes	67 768,82	72 535,81	77 638,11
5. PDRN ATAS DASAR BIAYA FAKTOR (Jut Rp)/ NRDP At Faktor Cost (Millions Rupiahs)	2 951 167,54	3 414 230,00	3 958 987,42
6. P E N D U D U K (Jiwa)/Population (People)	224 800	225 200	225 512
ANGKA PERKAPITA			
7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	14 276 557	16 388 472	18 868 099
8. PDRN PERKAPITA (Rp) PDRN Percapita (Rupiahs)	13 127 970	15 160 879	17 555 551

¹⁾ Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

Tabel 8 PDRB DAN ANGKA PERKAPITA KABUPATEN SOPPENG
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2011-2013

URAIAN/Descrptions	2011	2012 [*]	2013 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PDRB ATAS DASAR HARGA PASAR (Juta Rp)/ GRDP At Market Prices (Millions Rps)	1 304 050,64	1 401 588,87	1 507 686,50
2. PENYUSUTAN (Juta Rp)/ Defrecition (Millions Rps)	101 735,41	101 736,41	101 737,41
3. PDRN ATAS DASAR HARGA PASAR PDRN At Market Prices (Millions Rps)	1 202 315,22	1 299 852,46	1 405 949,09
4. PAJAK TAK LANGSUNG (Juta Rp) Net Indirect Taxes	36 292,00	36 293,00	36 294,00
5. PDRN ATAS DASAR BIAYA FAKTOR (Jut Rp)/NRDP At Faktor Cost (Millions Rupiahs)	1 166 023,22	1 263 559,46	1 369 655,08
6. P E N D U D U K (Jiwa)/Population (People)	224 800	225 200	225 512
ANGKA PERKAPITA			
7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5 800 937	6 223 752	6 685 615
8. PDRN PERKAPITA (Rp) PDRN Percapita (Rupiahs)	5 186 936	5 610 832	6 073 535

¹⁾ Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

Tabel 9 INDEKS BERANTAI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN SOPPENG ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2011-2013
(Tahun Sebelumnya = 100)

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PERTANIAN	114,28	109,99	111,81
a. Tanaman Bahan Makanan	114,69	108,05	110,70
b. Tanaman Perkebunan	108,83	114,63	112,79
c. Peternakan	121,92	111,00	113,37
d. Kehutanan	119,45	113,68	107,52
e. Perikanan	122,18	119,85	121,67
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	122,99	112,72	114,91
- Pertambangan Migas	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
- Penggalian	122,99	112,72	114,91
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	118,86	113,23	115,46
a. Industri Migas	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas **)	118,86	113,23	115,46
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	120,95	116,54	119,85
2. Tekstil Brg Kulit & Alas Kaki	120,29	104,13	106,16
3. Brg Kayu & Hasil Hutan Lainnya	111,07	99,00	97,93
4. Kertas dan Barang Cetakan	111,00	106,56	104,29
5. Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	-	-	-
6. Semen & Brg Galian Bukan Logam	115,36	112,11	111,96
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-
8. Alat Angk Mesin & Peralatannya	-	-	-
9. Barang Lainnya	114,78	107,18	99,73
4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	115,31	121,07	113,68
- Listrik	116,03	122,39	114,05
- Gas Kota	-	-	-
- Air Bersih	106,63	103,87	108,03
5 BANGUNAN	123,08	110,17	114,83

Lanjutan Tabel 9

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
6 PERDAGANGAN, HOTEL & RESTAURAN	123,93	126,74	121,86
- Perdagangan Besar & Eceran	116,78	127,27	124,57
- Hotel	132,66	115,80	117,13
- Restoran	166,46	124,66	110,34
7 ANGKUTAN & KOMUNIKASI	121,22	125,72	117,76
a. Pengangkutan	119,40	124,36	117,17
1. Angkutan Rel	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	119,37	124,37	117,18
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	137,77	118,00	114,83
b. Komunikasi	133,27	133,74	120,97
1. Pos dan Telekomunikasi	133,27	133,74	120,97
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-
8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	126,25	120,33	121,80
a. Bank	129,52	126,51	127,19
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	139,88	127,81	119,55
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
d. Sewa Bangunan	121,34	113,46	116,26
e. Jasa Perusahaan	141,10	113,72	115,84
9 JASA – JASA	116,17	115,86	115,28
a. Pemerintahan Umum	116,04	115,84	115,32
1. Adm Pemerintah & Pertahanan	113,87	107,57	115,32
2. Jasa Pemerintah Lainnya	121,45	135,15	115,32
b. S w a s t a	124,05	116,80	113,36
1. Sosial Kemasyarakatan	124,16	122,96	114,60
2. Hiburan dan Rekreasi	136,90	127,08	125,68
3. Perorangan dan Rumah Tangga	121,42	109,18	108,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	117,63	115,00	115,29

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 10 INDEKS BERANTAI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN SOPPENG ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2011-2013
(Tahun Sebelumnya = 100)

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PERTANIAN	106,11	102,85	105,22
a. Tanaman Bahan Makanan	106,76	100,47	104,76
b. Tanaman Perkebunan	102,63	107,81	105,54
c. Peternakan	111,80	108,67	104,17
d. Kehutanan	109,74	104,84	101,31
e. Perikanan	108,81	107,18	109,97
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	122,55	106,99	107,08
- Pertambangan Migas	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
- Penggalian	122,55	106,99	107,08
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	108,32	109,47	110,31
a. Industri Migas	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas **)	108,32	109,47	110,31
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	109,82	114,04	115,07
2. Tekstil Brg Kulit & Alas Kaki	107,18	100,08	103,16
3. Brg Kayu & Hasil Hutan Lainnya	103,40	94,55	92,72
4. Kertas dan Barang Cetakan	104,46	101,32	102,06
5. Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	-	-	-
6. Semen & Brg Galian Bukan Logam	107,63	106,27	108,57
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-
8. Alat Angk Mesin & Peralatannya	-	-	-
9. Barang Lainnya	106,07	103,71	97,75
4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	109,06	116,98	106,92
- Listrik	109,48	118,25	107,14
- Gas Kota	-	-	-
- Air Bersih	102,28	95,50	102,34
5 BANGUNAN	114,08	106,96	107,52

Lanjutan Tabel 10

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
6 PERDAGANGAN, HOTEL & RESTAURAN	114,97	119,60	112,82
- Perdagangan Besar & Eceran	108,65	120,07	114,69
- Hotel	120,26	108,24	108,34
- Restoran	151,49	117,83	104,94
7 ANGKUTAN & KOMUNIKASI	110,25	114,93	109,44
a. Pengangkutan	109,23	114,08	109,06
1. Angkutan Rel	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	109,20	114,08	109,06
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk Sungai, Danau & Penyebr	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	129,33	114,25	108,84
b. Komunikasi	122,81	124,21	113,20
1. Pos dan Telekomunikasi	122,81	124,21	113,20
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-
8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	113,74	116,36	111,06
a. Bank	116,47	123,82	113,88
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	128,05	124,42	113,61
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
d. Sewa Bangunan	109,92	109,59	108,27
e. Jasa Perusahaan	127,39	110,02	107,44
9 JASA – JASA	102,91	104,13	106,09
a. Pemerintahan Umum	102,59	104,08	106,10
1. Adm Pemerintah & Pertahanan	102,64	105,54	106,10
2. Jasa Pemerintah Lainnya	102,50	101,47	106,10
b. Swasta	115,71	105,84	105,57
1. Sosial Kemasyarakatan	119,09	105,02	103,36
2. Hiburan dan Rekreasi	125,67	121,28	119,70
3. Perorangan dan Rumah Tangga	110,92	103,32	104,15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	107,95	107,48	107,57

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 11 INDEKS IMPLISIT PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2011-2013 (%)

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PERTANIAN	232,12	248,23	263,78
a. Tanaman Bahan Makanan	249,43	268,26	283,47
b. Tanaman Perkebunan	181,81	193,30	206,58
c. Peternakan	241,40	246,58	268,35
d. Kehutanan	328,57	356,27	378,13
e. Perikanan	212,79	237,93	263,25
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	217,18	228,81	245,55
- Pertambangan Migas	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
- Penggalian	217,18	228,81	245,55
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	208,75	215,92	226,00
a. Industri Migas			
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas **)	208,75	215,92	226,00
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	222,67	227,55	237,00
2. Tekstil Brg Kulit & Alas Kaki	198,00	206,00	212,00
3. Brg Kayu & Hasil Hutan Lainnya	170,00	178,00	188,00
4. Kertas dan Barang Cetak	174,00	183,00	187,00
5. Pupuk, Kimia & Brg Dari Karet	-	-	-
6. Semen & Brg Galian Bukan Logam	182,00	192,00	198,00
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-
8. Alat Angk Mesin & Peralatannya	-	-	-
9. Barang Lainnya	190,62	197,00	201,00
4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	250,51	259,27	275,67
- Listrik	246,47	255,09	271,54
- Gas Kota	-	-	-
- Air Bersih	318,88	346,82	366,09
5 BANGUNAN	210,78	217,10	231,86

Lanjutan Tabel 11

LAPANGAN USAHA/Industrial Origin	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
6 PERDAGANGAN, HOTEL & RESTAURAN	259,73	275,24	297,32
- Perdagangan Besar & Eceran	260,30	275,92	299,69
- Hotel	200,35	214,33	231,71
- Restoran	258,32	273,28	287,34
7 ANGKUTAN & KOMUNIKASI	185,87	203,32	218,77
a. Pengangkutan	173,59	189,23	203,30
1. Angkutan Rel	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	173,56	189,22	203,29
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	190,75	197,00	207,83
b. Komunikasi	320,03	344,60	368,23
1. Pos dan Telekomunikasi	320,03	344,60	368,23
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-
8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER	234,94	242,96	266,46
a. B a n k	263,62	269,35	300,84
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	224,01	230,10	242,12
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
d. Sewa Bangunan	212,50	220,00	236,25
e. Jasa Perusahaan	249,19	257,56	277,72
9 JASA - JASA	331,59	368,94	400,93
a. Pemerintahan Umum	335,26	373,14	405,56
1. Adm Pemerintah & Pertahanan	336,11	373,14	443,58
2. Jasa Pemerintah Lainnya	280,16	373,14	337,96
b. S w a s t a	202,90	223,92	240,44
1. Sosial Kemasyarakatan	193,42	226,47	251,08
2. Hiburan dan Rekreasi	219,50	230,00	241,50
3. Perorangan dan Rumah Tangga	208,20	220,00	230,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	246,11	263,32	282,22

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

**PELOPOR DATA STATISTIK
TERPERCAYA UNTUK SEMUA**

<https://soppengkab.bps.go.id/>
<http://soppengkab.bps.go.id/>



BPS KABUPATEN SOPPENG
Jl. Salotungo Watansoppeng 90812
Telp. (0484) 21060, Fax. (0484) 21060
E-mail : bps7312@bps.go.id